

MEMBUMIKAN KEBERPIHAKAN

Inisiatif Daerah Menyiasati Kemiskinan



MEMBUMIKAN KEBERPIHAKAN
Inisiatif Daerah Menyiasati Kemiskinan

Cetakan Pertama, April 2019
ISBN: 978-602-275-172-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
©2019 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Foto Sampul: Sekretariat TNP2K
Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai Buku Panduan ini, silakan hubungi TNP2K melalui Unit Advokasi Daerah (advokasi@tnp2k.go.id). Buku Panduan ini juga tersedia di Website TNP2K (www.tnp2k.go.id)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3912812 | Faksimili: (021) 3912511
Email: info@tnp2k.go.id
Website: www.tnp2k.go.id

Pengantar

Penurunan tingkat kemiskinan merupakan upaya bersama semua pihak, termasuk kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Efektivitas penggunaan sumber pembiayaan, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, menjadi kunci penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan akan semakin ditentukan oleh kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggalang partisipasi semua pihak. Khususnya kemampuan daerah dalam memobilisasi perangkat kelembagaan pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya penurunan tingkat kemiskinan.

Dalam konteks ini, keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kesmiskinan (TKPK) di seluruh provinsi dan hampir seluruh kabupaten/kota merupakan modal penting bagi upaya penurunan tingkat kemiskinan. TKPK yang dipimpin oleh wakil kepala daerah, dibentuk untuk memastikan berbagai prasyarat penanggulangan kemiskinan terpenuhi: (1) Dukungan politik pimpinan daerah terhadap misi penanggulangan kemiskinan; (2) Ketepatan program dan efisiensi pengalokasian anggarannya; (3) Ketepatan sasaran penerimanya; (4) Sinergi antarprogram dari setiap dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait; dan (5) Komplementaritas antara program nasional dan daerah.

Buku ini menampilkan dinamika kelembagaan TKPK dalam mewujudkan upaya memenuhi prasyarat di atas. Buku ini disusun berdasarkan catatan dan pengalaman berinteraksi antara Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan TKPK selama sembilan tahun terakhir, serta hasil diskusi terfokus dengan TKPK diberbagai daerah. Kami berharap buku ini dapat menambah inspirasi bagi pemangku kepentingan di daerah dalam memperkuat kelembagaan TKPK.

Bambang Widiyanto

*Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Dukungan Kebijakan
Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan selaku
Sekretaris Eksekutif TNP2K*

Penghargaan

Penulisan buku ini tidak bisa dilepaskan dari para narasumber yang juga merupakan pemangku kebijakan di lima daerah studi, yakni Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Kota Bandung, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Banyumas.

TNP2K menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini, khususnya kepada:

Provinsi Jawa Timur: Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc. (Wakil Gubernur); Ir. Muhammad Yasin, MSi (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa); Muhammad Nasikin, SE (Staf Subbid Kesra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda)

Kota Surabaya: Whisnu Sakti Buana, S.T. (Wakil Walikota); Drs. Aston Tambunan, MSi (Sekretaris Dinas Pendidikan)

Provinsi Riau: Harry Prabowo, S. STP (Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau); Dwi Sri Rahayu, SKM (Staf Dinas Kesehatan)

Kabupaten Siak: DR. H. Wan Muhammad Yunus. ST. MT (Kepala Bappeda); Rio Arta MSi (Kepala Sub-Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan); Nurmias (Kepala Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinam (UED-SP) Kampung Seminau Jaya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau).

Kota Bandung: Lukman Surya, S Sos., MPS.Sp. (Kepala Subbidang Perencanaan Sosial Budaya Pemerintahan Bappelitbang); Lilis Rosidah (Kepala Seksi KSP Dinas Pangan dan Pertanian)

Kabupaten Gorontalo: Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. (Bupati); C.R. Katilie (Kepala Bappeda); Bambang Suprianto (Sekretaris Bappeda); Victor Asiku, S.STP, M.Si (Kepala Bidang Pembangunan Manusia Bappeda)

Kabupaten Banyumas: Wakhyono SIP (Kepala Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Bappedalitbang); Juni Setijarsih (Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan)

Penulis: Namira Samir

Pengolah Data: Toton Dartono

Editor: Taya Kadhita; Sukmawah Yuningsih; Muhammad Arif Tasrif

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Penghargaan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Istilah	v
Prolog	1
BAGIAN 1 – Dimensi Kesehatan	3
• Satu Banding Tiga Menjadi Satu Banding Delapan: Berpikir Layaknya Seorang <i>Strategist</i> untuk Menurunkan Prevalensi <i>Stunting</i>	4
• Menurunkan Prevalensi Tuberkulosis (TB) dengan Penganggaran Multidimensi	10
BAGIAN 2 – Dimensi Pendidikan	19
• Berlian yang Terpendam di Tengah Ledakan Urban	20
• Modal Manusia sebagai Obligasi di Era Industri 4.0	24
BAGIAN 3 – Dimensi Standar Kehidupan	31
• Mengombinasikan Strategi Pusat dan Daerah untuk Mengakhiri Kemiskinan di Setiap Dimensi	32
• Realisasi Otonomi Daerah Melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)	38
• Pengarusutamaan Gender dalam Pengentasan Kemiskinan: Menghilangkan Diskriminasi dengan Menghadirkan Prioritas	43
• <i>Urban farming</i> : Mesin Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan Sosial di Perkotaan	48
• Mewujudkan Falsafah Perekonomian Indonesia dengan Teknologi Pro-Kemiskinan	53
• Berdagang Lintas Batas: Ekspansi Pasar untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa	57
Epilog	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Prevalensi <i>Stunting</i> dan Kemiskinan Kabupaten Gorontalo Tahun 2015-2018	5
Grafik 2. Anggaran OPD terhadap Penanganan <i>Stunting</i> (Rp Juta) Tahun 2018	8
Grafik 3. Persentase Penduduk Miskin dan Success Rate (SR) Penanganan TB Provinsi Riau Tahun 2014-2018	14
Grafik 4. Alokasi Anggaran Kartu Banyumas Pintar (Rp Juta) Tahun 2014-2017	26
Grafik 5. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2016	27

DAFTAR ISTILAH

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APM	Angka Partisipasi Murni
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappelitbang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
BADUTA	Bawah Dua Tahun
BATITA	Bawah Tiga Tahun
BALITA	Bawah Lima Tahun
BDT	Basis Data Terpadu
BPNT	Bantuan Pangan Non-Tunai
BPNTG	Bantuan Pangan Non-Tunai Gemilang
BPS	Badan Pusat Statistik
BTA	Bakteri Tahan Asam
BUMKam	Badan Usaha Milik Kampung
CDR	Case Detection Rate
CNR	Case Notification Rate
DOTS	Directly Observed Treatment Short-Course
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gakin	Keluarga Miskin
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
ITB	Institut Teknologi Bandung
Jalin Matra	Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera
KBP	Kartu Banyumas Pintar
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KK	Kartu Keluarga
Kopi TB	Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis
KRTP	Kelompok Rumah Tangga Perempuan

OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PFK	Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan
PK2	Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan
RFID	Radio-Frequency Identification
RTM	Rumah Tangga Miskin
RTSM	Rumah Tangga Sangat Miskin
SD	Sekolah Dasar
SDGs	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMS	Short Message Service
G-Gas	Gugus Tugas
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
Pamsimas Masyarakat	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Posyandu Terpadu	Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu
PDB	Produk Domestik Bruto
Promkes	Promosi Kesehatan
PT	Perseroan Terbatas
Raskin	Beras Miskin
RW	Rukun Warga
SR	Success Rate
TB	Tuberkulosis
TCM	Tes Cepat Molekuler
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UED-SP	Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, Menengah
UNPSA	United Nations Public Service Awards
UU	Undang Undang
UUD	Undang Undang Dasar

Prolog

Januari 2019

Siaran berita televisi nasional, halaman utama koran-koran ternama, dan diskusi-diskusi informal di media sosial membicarakan topik angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,66 persen pada September 2018. Sayangnya, tidak banyak yang menceritakan dengan detail bagaimana angka kemiskinan terendah ini bisa dicapai oleh Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan, banyak berkontribusi dalam memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat dengan merencanakan inovasi program yang menysasar isu kemiskinan. Bagaimana pemerintah daerah merumuskan dan mengalokasikan anggaran untuk inovasi-inovasi tersebut, tidak banyak diketahui oleh publik. Mereka yang duduk di bangku perencanaan memikirkan dengan saksama agar anggaran dapat dialokasikan dengan efektif dan efisien untuk menysasar akar-akar penyebab kemiskinan di daerah.

Setiap daerah memiliki keunikan kondisi ekonomi dan geografis, serta isu kemiskinan yang berbeda. Buku ini menuliskan bagaimana lima daerah mengalokasikan anggaran dan merumuskan strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Sejarah patut mencatat para pejuang di balik pengentasan kemiskinan, yang meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Demi menjamin negara memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya.





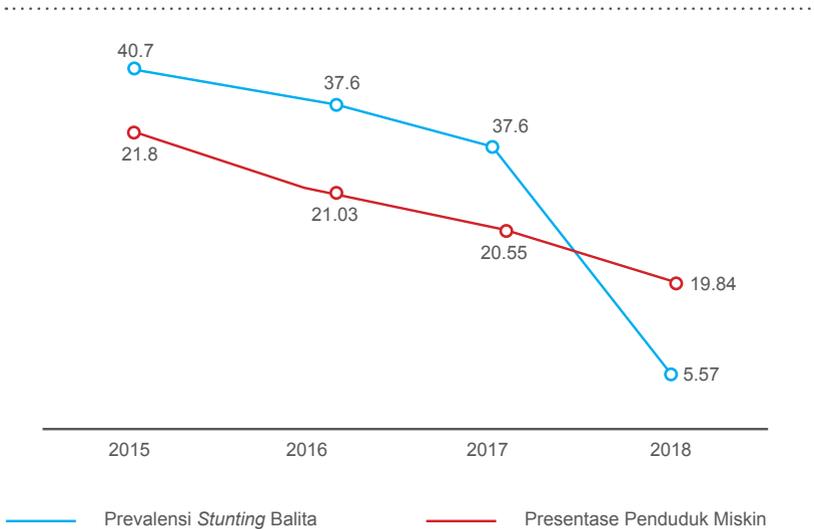
Bagian 1

DIMENSI KESEHATAN

Satu Banding Tiga Menjadi Satu Banding Delapan: Berpikir Layaknya Seorang *Strategist* untuk Menurunkan Prevalensi *Stunting*

Strategist adalah orang yang tahu persis melakukan sesuatu. Bukan karena kepintarannya, melainkan karena ia melakukan analisis dan membuat pertimbangan sebelum memecahkan masalah. *Stunting* adalah bentuk kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Jika Indonesia dapat meraup pencapaian yang membanggakan dalam bidang pengentasan kemiskinan konsumsi, hal berbeda terjadi pada isu *stunting*. Kali ini, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan jumlah penderita *stunting* terbanyak keempat di dunia.

Krisis nutrisi yang melanda banyak baduta, batita dan balita ini dapat membuat Indonesia gagal mendapatkan manfaat puncak bonus demografi pada 2030 nanti. Untuk itu, Pemerintah pusat telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengurangi prevalensi *stunting*. Kolaborasi antarpihak, perumusan kebijakan yang solutif, dan penganggaran untuk nutrisi telah dilakukan untuk mempercepat penurunan jumlah kasus *stunting*. Namun banyak pemangku kepentingan yang belum optimal menjalankan peran dan tugasnya. Perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perjuangan menurunkan prevalensi *stunting*. Di timur Indonesia, Kabupaten Gorontalo mencapai target yang dianggap mustahil. Daerah ini berhasil menurunkan prevalensi *stunting* dari semula 40,7 persen pada 2015 menjadi 5,57 persen pada 2018, sebuah prestasi yang tidak bisa dilepaskan dari kemampuan Pemerintah Daerah untuk merumuskan strategi yang bersumber dari akar permasalahan *stunting* di setiap pelosok Kabupaten Gorontalo.



Grafik 1. Prevalensi *Stunting* dan Kemiskinan Kabupaten Gorontalo, Tahun 2015-2018

Tak bisa dimungkiri bahwa Kabupaten Gorontalo menghadapi masalah sosial ekonomi. Data memperlihatkan bahwa 19,4 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Demikian juga angka partisipasi murni SD dan SMP, yakni 95,09 persen dan 65,27 persen, yang berada di bawah pencapaian nasional, yaitu 96,82 persen dan 67,73 persen.

Hal ini pula yang ditengarai memengaruhi kronisnya isu kesehatan di Kabupaten Gorontalo. Pada 2015, satu dari tiga anak berusia di bawah lima tahun di Kabupaten Gorontalo terhambat pertumbuhannya karena kekurangan nutrisi yang dibutuhkan dalam usia pertumbuhan. *Stunting* merupakan salah satu isu di bidang kesehatan yang memiliki konsekuensi jangka panjang, termasuk kemiskinan antargenerasi.

Dalam upaya mengurangi prevalensi *Stunting* di Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah tidak serta-merta menggunakan program umum penanganan *stunting* yang digunakan Pemerintah Pusat. Kesadaran akan pentingnya merumuskan program yang berasal dari akar permasalahan

yang dihadapi balita serta keluarga penderita *stunting* membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan evaluasi awal pada keluarga yang pertumbuhan anak-anaknya terhambat dan pada anak-anak yang menderita *stunting*.

“Salah satu penyebab dominan tingginya angka *stunting* di Kabupaten Gorontalo adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang *stunting*,” kata Sukarni Ismail, pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Penemuan ini bukan suatu kejutan karena korelasi antara pendidikan dan kesehatan sudah dibuktikan oleh banyak riset ilmiah.

Yang mengherankan, para orang tua menyadari bahwa anak-anak mereka tidak tumbuh normal di usianya, tetapi tetap memasrahkannya pada nasib. Para orang tua ini percaya bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan Tuhan sehingga manusia tidak punya pilihan. Padahal mereka memiliki pilihan untuk memperbaiki gizi anak-anaknya. Mereka tidak mengambil pilihan tersebut karena memahami definisi takdir secara keliru.

Melihat fenomena ini, pemerintah daerah memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendanai program dan layanan guna memerangi *stunting*. Anggaran program yang dialokasikan untuk masing-masing desa meningkat sekitar 133 persen, dari Rp106.105.000 pada 2017 menjadi Rp247.617.500 pada 2018.

Program-program yang dirumuskan selalu berangkat dari akar masalah *stunting* di Kabupaten Gorontalo. Misalnya pada 2014, pemerintah daerah membentuk Tim Gugus Tugas atau Tim G-Gas untuk membantu perempuan dengan risiko komplikasi kehamilan yang tinggi. Strateginya sederhana. Siapa pun dapat melaporkan masalahnya melalui Pusat Layanan Pesan Singkat (SMS) dan setelah diverifikasi, polisi atau tentara akan menjemput ibu hamil dari kediamannya untuk dibawa rumah sakit.

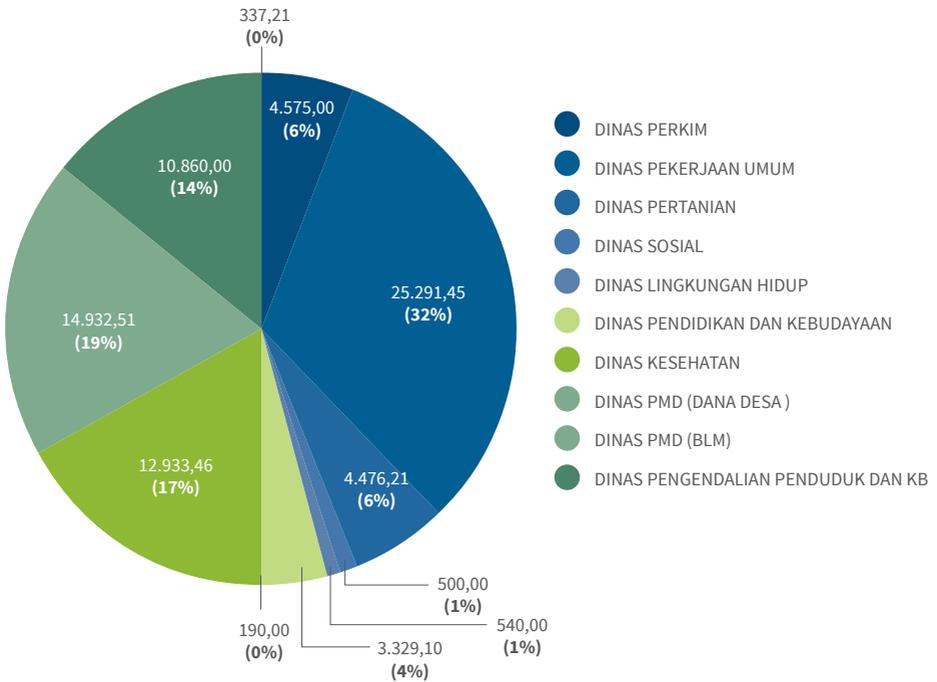
Selain efisien, program ini menunjukkan keberhasilan dalam mendidik masyarakat. Strategi ini secara positif memengaruhi perilaku dan pengetahuan masyarakat yang mungkin akan memberikan respons yang sama jika Dinas Kesehatan merekomendasikan untuk melahirkan di rumah sakit.

Tim G-GAS yang dirancang untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang persalinan dan masalah gizi, serta memastikan keselamatan ibu hamil sebelum dan setelah melahirkan, bukan satu-satunya program pemerintah Kabupaten Gorontalo. Pemerintah daerah masih memiliki program unik lain yang layak diceritakan.

Gorontalo merupakan daerah yang dijuluki “Serambi Madinah” karena kekayaan budaya Islam dan tingginya populasi muslim di provinsi ini, yang mencapai 90 persen penduduk. Pemerintah daerah kemudian menggunakan pendekatan keagamaan untuk mengurangi prevalensi *stunting* dengan menciptakan sebuah program bernama “Siyar Germas”. “Siyar” berasal dari bahasa Arab yang berarti “memberikan informasi”. Program ini mendidik masyarakat di masjid di dekat pusat kesehatan. Maka, masjid sekarang menjadi tempat untuk menyampaikan informasi dan memberikan anjuran, terutama kepada para ibu, tentang pentingnya gaya hidup sehat sehingga anak yang dilahirkan atau dibesarkan tidak mengalami kekurangan gizi. Penggunaan masjid sebagai medium untuk mengurangi prevalensi *stunting* bukan hanya itu. Masjid juga dijadikan tempat berbagi informasi tentang posyandu dan “poswindu”—layanan kesehatan bagi warga lanjut usia.

Program berkat prakarsa lokal ini menyentuh berbagai kategori populasi yang dianggap berada di sekitar masalah *stunting*. Banyak yang tidak mengira bahwa anemia, penyakit ringan yang dialami oleh banyak perempuan hamil, bisa menjadi penyebab *stunting*. Padahal anemia adalah penyakit yang umum terjadi selama kehamilan dan mungkin juga terjadi selama persalinan. Baik *stunting* maupun anemia dapat memengaruhi perkembangan kognitif dan kondisi fisik anak.

Memahami konsekuensi anemia terhadap perkembangan bayi, dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017, pemerintah daerah memprakarsai “Arisan Si Dora”, pertemuan yang menghimpun donasi darah, yang bertujuan mengurangi risiko kematian pada ibu hamil karena penanganan yang terlambat dan tidak tersedianya darah, dengan menyiapkan daftar calon donor yang bersedia menyumbangkan darah pada saat dibutuhkan.



Grafik 2. Anggaran OPD dalam Penanganan *Stunting* (Rp Juta) Tahun 2018

Selain program-program yang inovatif dan berangkat dari permasalahan riil di masyarakat, kunci keberhasilan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Gorontalo adalah pembentukan Kelompok Kerja *Stunting* atau Pokja *Stunting* yang bertujuan untuk mempermudah koordinasi, implementasi, dan evaluasi program pemberantasan *stunting*.

Kelompok kerja yang dipimpin langsung oleh Bupati Gorontalo ini tidak hanya untuk berkoordinasi. Pokja *Stunting* melahirkan ide-ide inovatif dan solutif untuk mengatasi berbagai akar permasalahan *stunting*. Lebih lanjut, Pokja *Stunting* memungkinkan penggunaan APBD lebih efektif dan efisien karena program dan metode intervensi diputuskan bersama oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga metode penargetan yang tepat dapat dijalankan.

C.R. Katilie, Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo, menyampaikan bahwa keberhasilan program pemberantasan *stunting* adalah berkat kemampuan pemerintah daerah menggunakan kerangka berpikir yang andal. Setiap program yang dirancang dan setiap sen uang yang dialokasikan dari APBD harus berangkat dari masalah yang ada di masyarakat. Setelah mengetahui akar penyebab masalahnya, solusi masalah tersebut ditentukan, yang kemudian diterjemahkan menjadi inovasi dalam bentuk program.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo berhasil merealisasikan target yang mungkin membutuhkan satu abad untuk mencapainya. Berkat evaluasi komprehensif akan akar penyebab *stunting*, perumusan program yang inovatif, penganggaran berbasis data, serta koordinasi antarpihak, prevalensi *stunting* turun dari 40,7 persen pada 2015 menjadi 5,57 persen pada 2018.

Meskipun perkembangan dan kemajuan dalam bidang nutrisi berhasil dicapai, ribuan jiwa di Kabupaten Gorontalo masih mengalami kekurangan gizi. *Stunting* masih akan tetap ada di negeri ini jika pengetahuan dan kesadaran masyarakat tidak dibenahi.

“Kita dilahirkan untuk tidak menjadi miskin. Kita selalu dapat mengubah kondisi dan itu membutuhkan kemauan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses ini,” kata Bambang Suprianto, Sekretaris Bappeda Kabupaten Gorontalo. Hanya dengan menggunakan pola pikir seperti inilah Indonesia bisa mencapai garis *finish* dalam memberantas *stunting*.

Menurunkan Prevalensi Tuberkulosis (TB) dengan Penganggaran Multidimensi

Dianggap sebagai negara dengan kasus tuberkulosis (TB) terbanyak kedua di dunia, Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyakit menular yang telah menelan banyak nyawa ini. Langkah kuratif dan preventif tak hanya diambil pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Riau, misalnya, melibatkan perangkat daerah terkait sehingga penanggulangan kasus TB sekaligus pengentasan kemiskinan dalam hal pendidikan dan standar hidup.

Menghadapi rendahnya kemauan masyarakat untuk secara sukarela melakukan pemeriksaan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menginisiasi “Posko TB Berjalan”. Melalui program ini tenaga medis dengan perangkat kesehatannya mendatangi warga yang diduga mengidap penyakit TB. Tidak hanya langkah pengobatan, pemerintah pun mengerahkan petugas kesehatan untuk turun lapangan mencari masyarakat yang belum terjangkau TB namun rentan karena lingkungan yang kurang steril dan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan penyediaan obat-obatan untuk mencegah penularan. Seluruh strategi dapat dijalankan dengan baik berkat kunci utama: proses penganggaran yang berangkat dari masalah inti penyebab tingginya prevalensi TB di Provinsi Riau, yang melibatkan lebih dari satu dimensi kemiskinan.

Harry Prabowo, Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Provinsi Riau, menyampaikan bahwa prioritas pembangunan di wilayahnya bertumpu pada upaya mengatasi kemiskinan multidimensi. “Kami menyadari sepenuhnya bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kemampuan memenuhi kebutuhan dasar saja, namun juga pengetahuan yang cukup serta fisik yang sehat,” katanya. Pemikiran tersebut tercermin pada komitmen Provinsi Riau untuk mengatasi tingginya prevalensi TB.

TB sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kalori harian, yang akan berdampak pada kesehatannya. Orang miskin tak memiliki kecukupan finansial sehingga mereka cenderung tinggal di daerah-daerah kumuh, yang membuat kesehatan mereka tak terpelihara dengan baik. Akibatnya, daya tahan tubuh mereka menjadi lemah sehingga mudah terpapar penyakit menular seperti TB.

Sebagai ujung tombak penanganan isu kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menekankan pentingnya analisis yang komprehensif terhadap permasalahan sebelum intervensi dilakukan. Dalam temuannya, mereka yang rentan atau diduga mengidap TB pada umumnya adalah kelompok umur 15-55 tahun, bertempat tinggal di lingkungan yang kumuh, serta hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak hanya menanggung masalah kesehatan pribadinya, mereka pun bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain, yang berakibat pada makin kecilnya kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup. Pada akhirnya, ikhtiar pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan bisa berakhir percuma lantaran akar permasalahan kemiskinan di Provinsi Riau, yakni tingginya prevalensi TB, tidak berhasil diatasi.

Pengidap TB di Provinsi Riau ternyata bukan hanya mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Salah satu temuan mengejutkan adalah tingginya prevalensi TB di antara aparatur sipil negara (ASN). Hal ini tentu akan mengganggu performa mereka dan berpeluang menulari sejawatnya. Makin gawat lagi jika ASN tersebut berprofesi sebagai tenaga pendidik yang sehari-hari berinteraksi dengan siswa/mahasiswa. Maka, dalam memetakan dan menangani kasus TB di Riau, Dinas Kesehatan menggunakan upaya kuratif dan preventif untuk menurunkan kasus TB dan menghilangkan potensi mencuatnya kasus-kasus TB baru.

Salah satu masalah dalam penemuan dan penanganan kasus TB adalah keterbatasan metode diagnosis cepat yang dapat diandalkan. Maka, mengacu pada strategi yang dilakukan pemerintah pusat, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) TB untuk mempercepat diagnosis terduga TB dan TB resistensi obat sehingga pasien dapat didiagnosis dan diobati dalam waktu lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Biasanya, diagnosis membutuhkan waktu 3-4 hari, sedangkan dengan TCM TB hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam.

Program unggulan lainnya adalah “Posko TB Berjalan”, yakni strategi yang didasarkan rendahnya kemauan masyarakat untuk melaporkan kondisinya ke puskesmas/rumah sakit terdekat. Untuk itu, Dinas Kesehatan melakukan “jemput bola” dengan mendatangi langsung warga penderita TB menggunakan mobil atau sepeda motor.

Para petugas kesehatan mendapatkan informasi mengenai warga yang terjangkit TB dari tetangga. Laporan tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk “jemput bola” yang merupakan bagian program “Posko TB Berjalan”.

Bukan hanya menjemput mereka yang sudah dipastikan mengidap TB, para kader kesehatan mendatangi rumah-rumah atau daerah-daerah yang rentan penyakit TB. Ini bukanlah perkara mudah dan hasil yang didapatkan pun tidak instan. Setiap hari para kader kesehatan berkeliling mengendarai sepeda motor dalam misi memerangi TB di seluruh pelosok Riau untuk memastikan bahwa penanganan penyakit tersebut tak hanya tepat sasaran, tetapi juga menjangkau mereka yang selama ini tidak terlihat dalam data. Hal tersebut mendorong ketepatan sasaran penanganan TB, yang juga turut menggenjot efektivitas anggaran kesehatan, khususnya untuk isu TB.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa TB adalah penyakit yang penularannya sangat mudah terjadi, yang salah satu penyebab mewabahnya penyakit ini adalah ketidaklayakan infrastruktur dasar. Bappeda Provinsi Riau memahami urgensi pembenahan sanitasi yang merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh para penderita TB dari keluarga kurang mampu.

Upaya preventif melalui peningkatan sanitasi layak ini tercermin pada tren kenaikan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Riau dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik pada 2016 memperlihatkan bahwa proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Riau dibandingkan dengan nasional mencapai 71,36 persen berbanding 67,8 persen.

Angka tersebut juga berkorelasi positif dengan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan di Provinsi Riau pada 2016, yakni 27,89 persen, yang terus mengalami penurunan dan sudah lebih rendah dari rata-rata nasional, 28,53 persen.

Tuberkulosis tak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga erat kaitannya dengan rendahnya pengetahuan. Banyak masyarakat dengan tingkat perekonomian cukup yang mengalami gejala TB enggan memeriksakan diri karena pengetahuan akan TB minim. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi atau penyuluhan bagi masyarakat agar menurunnya prevalensi TB sejalan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai TB. Sehingga, penyakit TB tidak menjadi endemik.

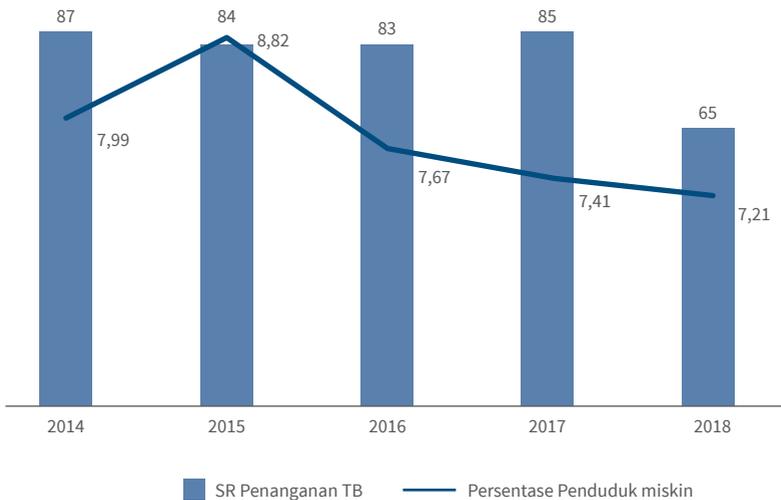
Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengerahkan puskesmas untuk secara kontinu mengedukasi masyarakat mengenai penyakit tuberkulosis, langkah-langkah preventif agar terhindar dari penularan, tindakan yang harus dilakukan jika hasil pemeriksaan positif terjangkit TB, dan agar pengidap TB tidak menularkannya ke orang lainnya.

Temuan menarik lainnya adalah banyaknya penderita TB di lingkungan swasta yang memilih untuk tidak melaporkan penyakitnya ke petugas kesehatan. Melihat fenomena ini dan menyadari pentingnya kolaborasi dalam menyukkseskan misi Pemerintah Provinsi Riau menurunkan jumlah penderita TB, Dinas Kesehatan melibatkan Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis atau Kopi TB, yang merupakan gabungan organisasi profesi, dengan misi meningkatkan keberhasilan penanggulangan TB di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya menemukan kasus TB di lingkungan swasta di Riau. Keterlibatan Kopi TB menguatkan komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah kesehatan yang dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian keluarga penderita, juga perekonomian daerah pada umumnya.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap program dan inovasi yang dilakukan, Dinas Kesehatan Riau menggunakan tiga indikator utama untuk mengukur keberhasilan program TB, yakni *case detection rate* (CDR), *case notification rate* (CNR), dan *success rate* (SR).

CDR merupakan persentase pasien baru TB Paru BTA+ (Bakteri Tahan Asam—*Mycobacterium tuberculosis*) yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah pasien baru TB Paru BTA+ yang diperkirakan ada di suatu wilayah. Indikator ini digunakan hingga 2015 untuk mengevaluasi capaian penurunan prevalensi TB sebagai salah satu capaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

Pada 2016, CDR digantikan dengan CNR, yakni indikator yang menjelaskan jumlah seluruh kasus TB yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah. CNR lebih dapat diandalkan karena memperlihatkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun. Selain itu, tinggi rendahnya angka CNR dipengaruhi oleh kinerja sistem pencatatan dan pelaporan di wilayah tersebut, jumlah fasilitas pelayanan



Grafik 3 Persentase Penduduk Miskin dan *Success Rate* (SR) Penanganan TB Provinsi Riau, Tahun 2014-2018

kesehatan yang terlibat layanan DOTS atau directly observed treatment short-course, dan banyaknya pasien TB yang tidak masuk laporan fasilitas pelayanan kesehatan. Inilah yang menjadikan CNR lebih dapat diandalkan dalam menuntaskan angka TB di suatu wilayah. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau menunjukkan bahwa tren penemuan kasus TB cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun, dari 2017 ke 2018, CNR TB di Provinsi Riau memperlihatkan penurunan, dari 152 ke 128, yang mengindikasikan perlunya inovasi atau perbaikan terus-menerus sehingga pelaporan kasus TB bisa lebih aktual.

Selanjutnya, indikator yang digunakan adalah SR yang menggambarkan keberhasilan penanganan penyakit TB. SR merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Tinggi-rendahnya SR dipengaruhi oleh kepatuhan pasien serta pengetahuan akan perilaku hidup bersih dan sehat. SR TB Provinsi Riau pada 2014-2018 juga tampak fluktuatif, dan mengalami penurunan, dari 8 persen pada 2017 menjadi 65 persen pada 2018.

Data CDR, CNR dan SR tuberkulosis ini menjadi cambuk bagi Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk membuat pemetaan yang lebih spesifik mengenai prevalensi TB di berbagai wilayah dan untuk merumuskan serta memperbaiki berbagai program penurunan prevalensi TB. Ke depan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan mengoptimalkan upayanya untuk meningkatkan penemuan kasus TB di lingkup pemerintahan, pendidikan serta swasta melalui berbagai strategi. Tentu, dalam menjalankan program tersebut Dinas Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. Hal ini pula yang disampaikan oleh Dwi Sri Rahayu dari Dinas Kesehatan yang hadir dalam rapat koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau pada 14 Februari 2017. Meskipun program TB adalah program prioritas Dinas Kesehatan, namun untuk eksekusinya tidak bisa dikerjakan sendiri. Perlu ada kerja sama antara organisasi perangkat daerah terkait. Misalnya, untuk menjamin agar program TB tepat sasaran, perlu ada kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Untuk menysasar penderita TB yang berasal dari keluarga miskin, Dinas Kesehatan mengacu pada data dari Basis Data Terpadu atau BDT yang didapat dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Bappeda Provinsi Riau.

Berdasarkan evaluasi rapat koordinasi aparat daerah Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kunci utama dalam penanganan masalah TB adalah pemahaman aparat daerah mengenai keterkaitan antara TB dan kemiskinan. Sehingga, penanganan TB menjadi salah satu program prioritas

pemerintah daerah sekaligus komitmen untuk mengalokasikan anggaran dalam menysasar masalah-masalah mendasar yang menjadi akar penyebab TB. Selain itu, diperlukan inovasi program yang berangkat dari permasalahan di masyarakat yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan geografis, serta ketersediaan data untuk menunjang keberhasilan penurunan angka penderita TB.

Pembangunan yang inklusif mempertimbangkan berbagai dimensi kemiskinan dalam memastikan tercapainya pembangunan yang menjamin keberlangsungan hidup seluruh masyarakat. Masih banyak hal yang harus dibenahi dari pencapaian Riau dalam menurunkan tingginya prevalensi TB. Namun yang perlu diapresiasi dan dijadikan pelajaran adalah komitmen untuk meletakkan TB sebagai isu kesehatan prioritas yang harus ditanggulangi sebagai usaha menghapus kemiskinan dalam berbagai bentuknya, yang diwujudkan dengan pengalokasian anggaran untuk menysasar faktor-faktor penyebab tingginya prevalensi TB.







Bagian **2**

DIMENSI PENDIDIKAN

Berlian yang Terpendam di Tengah Ledakan Urban

“Setiap orang bertanggung jawab terhadap kehidupannya masing-masing” adalah tanggapan yang kerap muncul dalam pembahasan mengenai pengentasan kemiskinan. Jika memang begitu, kita melupakan peran pemerintah sebagai agen pelayan masyarakat untuk mengatasi masalah yang terjadi di luar kendali masyarakat. Misalnya, keluarga di bawah garis kemiskinan tidak akan mampu membiayai studi anggota keluarganya di perguruan tinggi di Tanah Air yang kian mahal. Banyak dari mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi B.J. Habibie baru atau R.A. Kartini masa kini, namun peluangnya terbandung karena tak bisa mengakses pendidikan tinggi.

Pemerintah Kota Surabaya menyadari bahwa terhambatnya kesempatan penduduk miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi menjadi akar kemiskinan Kota Surabaya. Seperti di wilayah urban lainnya, kompetisi memperoleh pekerjaan yang layak di Surabaya sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan akhir yang ditempuh. Ini potret yang memperlihatkan bagaimana pemilihan intervensi untuk pengentasan kemiskinan harus berdasarkan kondisi di masing-masing daerah.

Atas fenomena tersebut, pada 2009 Pemerintah Kota Surabaya menginisiasi beasiswa kuliah keluarga miskin (gakin). Hal ini berdampak positif pada menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin di Surabaya. Alokasi anggaran pendidikan untuk masyarakat miskin merupakan pengejawantahan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi.

Pintar saja tidak cukup. Mereka yang cerdas tak akan mampu menggapai dunia yang lebih baik jika jalan menuju kesempatan itu terhalang oleh biaya pendidikan yang mahal. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk keluar dari jurang kemiskinan. Namun untuk memperoleh kunci tersebut, terkadang masyarakat dihadapkan pada kendala yang sulit diselesaikan seorang diri.

Keluarga miskin dengan pendapatan yang terbatas memprioritaskan penggunaan uangnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lupakan menabung untuk berbagai keperluan tak terduga. Untuk memenuhi kebutuhan pangannya saja sudah sulit. Pada akhirnya, kebutuhan mereka menyingkirkan perkara sekunder seperti menempuh pendidikan tinggi yang biayanya tidak terjangkau.

Di Jawa Timur, tepatnya di Kota Surabaya, pemerintah daerah berperan sentral dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai solusi mengentaskan kemiskinan multidimensi, yang pada 2009 angka kemiskinannya mencapai 6,72 persen. Keputusan tersebut juga merupakan strategi untuk memperbaiki partisipasi pendidikan di Kota Surabaya, yang dicerminkan oleh angka partisipasi murni (APM) SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA, serta angka buta huruf.

Rumah tangga yang anggota keluarganya tidak menempuh pendidikan tinggi cenderung memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang layak dari pekerjaannya. Walhasil, hal tersebut berdampak terhadap anggota keluarga yang berada dalam rentang usia sekolah sehingga memengaruhi pencapaian indikator pendidikan.

Beasiswa Kuliah Keluarga Miskin telah berjalan sejak 2009. Pada 2009-2017, beasiswa ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial. Sejak 2018, Beasiswa Kuliah Gakin sepenuhnya di bawah naungan Dinas Pendidikan. Calon mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa mengajukan permohonan ke dinas terkait yang kemudian akan ditindaklanjuti jika memenuhi persyaratan. Biaya yang ditanggung meliputi biaya masuk perguruan tinggi, biaya kuliah, dan biaya hidup.

Selain beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi, Beasiswa Gakin juga diberikan kepada mereka yang ingin berkarier di dunia aviasi sebagai pramugari/pramugara dan pilot. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan skema kerja sama dengan menggandeng anak perusahaan Garuda Indonesia, Citilink, sebagai partner dalam pembiayaan untuk membantu masyarakat miskin menggapai mimpi besarnya di dunia penerbangan. Dengan menggunakan skema kerja sama, selain menggunakan anggaran daerah, makin banyak orang dari keluarga miskin yang bisa menempuh pendidikan tinggi.

Dalam proses verifikasi data penerima Beasiswa Gakin, Pemerintah Kota Surabaya merujuk pada Basis Data Terpadu atau BDT TKPK yang menyimpan data 40 persen masyarakat ekonomi terbawah atau miskin. Dengan data nama dan alamat atau by name by address yang disiapkan oleh calon penerima beasiswa yang divalidasi kebenarannya melalui BDT, program beasiswa kuliah Gakin tepat sasaran.

Pada hakikatnya, program Beasiswa Kuliah Gakin dari Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk mencapai tiga hal, yakni 1) mendorong lebih banyak mahasiswa miskin untuk berkuliah; 2) membantu pembiayaan mahasiswa miskin; serta 3) meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Turunnya angka kemiskinan kota Surabaya dari semula 6,72 persen pada 2009 menjadi 4,88 persen pada 2018 bisa jadi hasil dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja sehingga bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis Surabaya yang terletak di pusat Jawa Timur dan jumlah penduduk perkotaan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perdesaan, tingkat persaingan antar-angkatan kerja lebih tinggi daripada di kabupaten. Hal ini menjadikan program pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan merupakan strategi yang relevan diterapkan di Surabaya.

Takdir merupakan kombinasi antara kerja keras dan keberuntungan. Seseorang tidak memiliki pilihan di keluarga seperti apa ia dilahirkan. Jika ia terlahir di keluarga dengan tingkat pendapatan 20 persen terbawah, kesempatannya untuk naik tingkat sangatlah kecil. Namun dengan

kerja keras, ia dapat mengubah nasibnya menjadi lebih baik.

Akan tetapi, kerja keras tanpa keberuntungan tidak ada artinya. Keberuntungan di sini adalah akses—kesempatan yang diberikan kepada mereka yang kurang mampu namun sungguh-sungguh ingin meningkatkan taraf hidupnya.

Selama ini, pengentasan kemiskinan cenderung terpaku pada bagaimana menurunkan angka kemiskinan, bukan pada penyelesaian akar kemiskinan. Maka penting bagi pemerintah untuk menentukan pilihan dan memutuskan program untuk menyejahterakan masyarakatnya dalam berbagai aspek kehidupan.

Agar tepat sasaran dan metode intervensinya pas, pemerintah harus memahami kondisi kemiskinan di daerah tersebut, apa inti permasalahannya, dan kebijakan atau program apa yang harus diambil untuk memperbaiki situasi. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, “Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kota Surabaya dan merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan.”

Beasiswa Kuliah Gakin merupakan contoh program yang dapat mentransformasi kondisi ekonomi keluarga miskin dengan menysasar pencapaian pendidikan anggota keluarganya. Berlian-berlian yang sebelumnya terpendam di tengah ledakan penduduk urban di Surabaya, dapat terangkat ke permukaan dan dioptimalkan manfaatnya untuk keluarga, masyarakat, dan negara. Ini merupakan manifestasi keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah perkotaan.

Modal Manusia sebagai Obligasi di Era Industri 4.0

Ketenagakerjaan dan pendidikan adalah dua bidang yang tidak dapat dipisahkan. Di negara maju, pendidikan dan keahlian warganya disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang makin bergantung pada teknologi. Di negara berkembang seperti Indonesia, peran sumber daya manusia masih lebih dominan dibandingkan dengan pemanfaatan teknologi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berkorelasi positif dengan penciptaan lapangan kerja. Pada akhirnya, manfaat teknologi melalui berbagai inovasinya harus dapat dioptimalkan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dengan memberikan porsi anggaran yang cukup untuk bidang pendidikan. Di Indonesia, pemerintah pusat menginisiasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada akhir 2014 untuk membantu anak berusia 7-18 tahun agar dapat bersekolah secara gratis. Program ini ditujukan pada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Walaupun dampaknya terhadap angka putus sekolah dan ketenagakerjaan telah dirasakan oleh banyak masyarakat miskin, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menyebabkan tidak semua anak usia sekolah dari keluarga miskin memperoleh manfaat KIP.

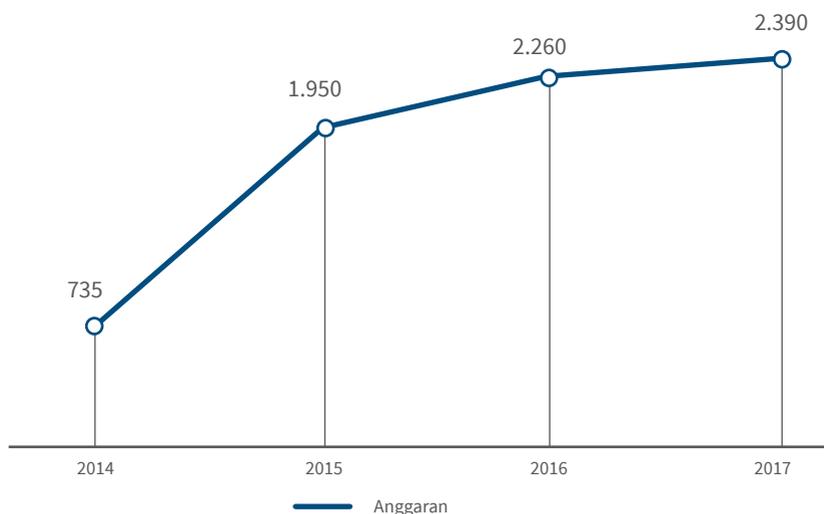
Pada Revolusi Industri 4.0, teknologi mengambil alih banyak peran manusia. Kini, pekerjaan yang cenderung berulang dapat digantikan teknologi. Namun tidak berarti peran manusia dalam perekonomian mengalami pengurangan nilai. Sumber daya manusia menjadi perwujudan kesejahteraan rakyat di suatu negara dan faktor utama di balik transformasi ekonomi modern.

Hal tersebut juga tercermin dari pola pikir pemangku kebijakan, yang sering kali mengaitkan modal manusia dan lapangan pekerjaan pada perekonomian modern. Namun sebenarnya, tujuan fundamental dari reformasi pendidikan lebih dari itu. Dengan pendidikan, masyarakat bertransformasi dari hanya sebagai penikmat hasil pekerjaan pemerintah menjadi pemikir masa depan bangsa. Masyarakat pun mampu melihat permasalahan bangsa dari bidang yang digelutinya dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya.

Data menunjukkan bahwa rata-rata lama bersekolah di Kabupaten Banyumas mencapai 7,40 tahun. Artinya, angkatan kerja penduduk Banyumas masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Hal tersebut memperlihatkan bahwa isu ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas adalah tingginya *low-skilled labour* atau pekerja dengan keahlian rendah, sehingga berdampak pada angkatan kerja yang sebagian besar bekerja di sektor informal.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Banyumas mereplikasi KIP menjadi Kartu Banyumas Pintar (KBP), yang juga merupakan bagian dari “Hasta Krida” atau Delapan Program Unggulan Kabupaten Banyumas. Dengan menggunakan “Hasta Krida” sebagai cetak biru pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banyumas meyakini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial daerahnya.

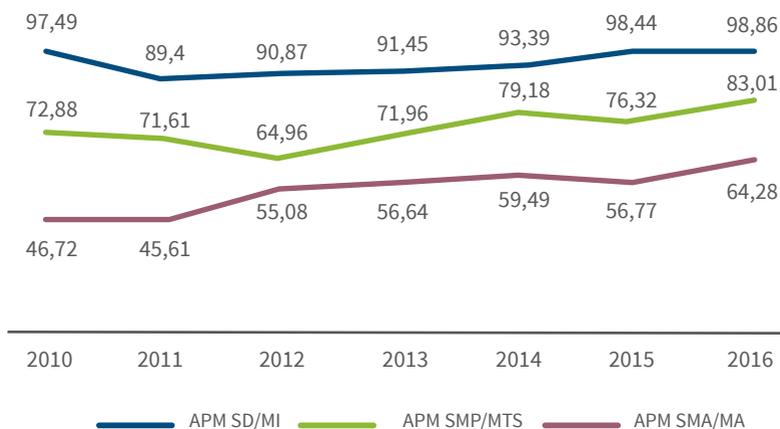
Program KBP bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Selain untuk melengkapi program KIP dari pemerintah pusat, program KBP dimaksudkan untuk menjawab isu ketenagakerjaan, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan di kabupaten ini.



Grafik 4 Alokasi Anggaran Kartu Banyumas Pintar (Rp. Juta), Tahun 2014-2017

Anggaran KBP seratus persen bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas. Awalnya, KBP diberikan kepada siswa miskin yang bersekolah di SD, SMP, dan SMA/SMK. Namun sejak 2017, program untuk SMA/SMK ditarik ke provinsi. Sehingga, alokasi anggaran sejak 2017 hanya untuk siswa miskin di tingkat SD dan SMP.

Pada 2014 dan 2015, bantuan untuk setiap siswa di jenjang SD dan SMP masing-masing Rp360 ribu dan Rp550 ribu per tahun. Sejak 2016, bantuan naik menjadi Rp500 ribu dan Rp750 ribu. Menurut Enas Hinasah, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, pemerintah daerah berencana menaikkan anggaran KBP untuk SMP dari sebelumnya Rp1,39 miliar pada 2017 dan 2018 menjadi Rp2 miliar pada 2019, yang ditujukan untuk 2.000 siswa SMP. Dengan mengalokasikan anggaran KBP sejak 2014 untuk siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu, hal ini berdampak pada meningkatnya angka partisipasi murni SD dan SMP di Kabupaten Banyumas.



Grafik 5 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banyumas, Tahun 2010-2016

Pemerintah Kabupaten Banyumas mengharapkan KBP turut mengatasi isu ketenagakerjaan dan isu sosial-ekonomi yang tercantum dalam “Hasta Krida”. Untuk memastikan program tepat sasaran, Dinas Pendidikan menggunakan BDT dari TKPK sehingga mengurangi kemungkinan salah sasaran. Dengan demikian anggaran daerah tersalurkan dengan tepat kepada mereka yang membutuhkan.

Dinas Pendidikan tidak bekerja sendiri dalam mengimplementasikan KBP. Sekolah juga dilibatkan untuk memastikan bahwa dana yang dikucurkan benar-benar digunakan untuk kebutuhan sekolah, bukan untuk keperluan lainnya yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Mekanisme pelaporan yang digunakan adalah dengan mewajibkan penerima bantuan untuk menyerahkan kuitansi penggunaan dana kepada sekolah tempat siswa tersebut belajar. Selanjutnya, sebagai bentuk evaluasi menyeluruh, Dinas Pendidikan melakukan pengecekan ke sekolah terkait.

Tentu, hasil dari KBP tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat. Perlu proses yang panjang untuk melihat hasil investasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam perekonomian. Namun jika mengacu pada perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

merupakan capaian indikator pembangunan secara keseluruhan, yang terdiri dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, IPM Kabupaten Banyumas terus meningkat dari sejak awal KBP diberikan, dari 69,25 persen pada 2014 menjadi 70,75 persen pada 2017.

Kabupaten Banyumas, dengan komitmennya untuk berinvestasi pada sumber daya manusia, berhasil menciptakan “*ripple effect*” atau “efek riak”. Misalnya, angka kemiskinan pada 2014 yang mencapai 17,45 persen menurun menjadi 13,50 persen pada 2018. Hasil positif lainnya dapat dilihat dari tingkat pengangguran di Kabupaten Banyumas yang konsisten menurun. Dari 5,68 persen pada 2014 menjadi 4,19 pada 2018. Bahkan, ketika angka pengangguran provinsi dan nasional meningkat, angka pengangguran di Banyumas tetap mengalami penurunan.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pendidikan dengan menggunakan metode penyasaran yang tepat berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Imbasnya juga bisa dilihat dari angka partisipasi murni di tingkat sekolah dasar, menengah, dan atas yang terus membaik.

Layaknya obligasi, pendidikan adalah investasi jangka panjang, yang manfaatnya tidak akan dirasakan secara instan. Ada saat manfaat investasi di bidang pendidikan akan datang dengan sendirinya. Akan tetapi, pemerintah tidak boleh lengah. Segala bentuk stimulus yang dapat memaksimalkan nilai investasi tersebut harus dimanfaatkan agar gejolak politik, ekonomi, dan sosial yang mungkin terjadi tidak menurunkan nilai keuntungan yang akan diraup kelak. Maka, investasi di bidang pendidikan tidak boleh melupakan pentingnya pengembangan keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini.







Bagian 3

DIMENSI STANDAR KEHIDUPAN

Mengombinasikan Strategi Pusat dan Daerah untuk Mengakhiri Kemiskinan di Setiap Dimensi

Dalam mengakhiri kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah menghadapi tantangan. Di antaranya, bagaimana agar program yang dijalankan memberdayakan mereka yang duafa agar keluar dari jurang kemiskinan sembari tidak melupakan mereka yang lanjut usia atau lansia, yang merepresentasikan sebagian kecil masyarakat miskin.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperlihatkan praktik nyata kombinasi strategi pusat dan daerah dengan menggunakan APBD untuk program pengentasan kemiskinan yang didukung program pemberdayaan, dan untuk menyokong mereka yang hampir tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dengan bantuan sosial.

Bantuan pangan nontunai atau BPNT adalah program bantuan sosial atas prakarsa pemerintah pusat untuk memastikan masyarakat miskin mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun penelitian Abhijit Banerjee dan Esther Duflo di daerah pedesaan di Indonesia menemukan bahwa meskipun pemenuhan kebutuhan dasar sangat penting untuk membawa orang keluar dari kemiskinan, pemberian bantuan sosial saja tidak cukup.

Ketika hanya tinggal dua puluh persen penduduk di suatu wilayah dikategorikan miskin, mereka adalah masyarakat yang tetap berada di bawah garis kemiskinan karena kebijakan pemerintah tidak berhasil memberantas kompleksitas kemiskinan. Sebagian besar inisiatif nasional seperti bantuan tunai, BPNT, hingga jaminan kesehatan nasional, hanya menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan dasar. Cara-cara konvensional tersebut tidak akan mampu menyelesaikan kompleksitas kemiskinan Indonesia. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika program bantuan dan jaminan sosial ini dihentikan. Tanpa peningkatan pendapatan yang signifikan, masyarakat miskin akan kembali ke kondisi awal mereka sebelum menerima bantuan sosial.

Sayangnya, gagasan ini ini belum menjangkau sebagian besar pengambil kebijakan di Indonesia. Banyak pengambil kebijakan yang masih mengandalkan program populer ini. Namun di Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah menerapkan strategi lain. Mereka menjalankan program yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin produktif melalui pemberian dana bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pemberian beasiswa untuk anak dari keluarga kurang mampu.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggunakan skema 70-30 dalam anggaran pengentasan kemiskinan, dengan 70 persen anggaran dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi dan sisanya digunakan untuk “BPNT Gemilang”, sebuah program bantuan pangan nontunai yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar keluarga miskin yang belum tercakup BPNT pemerintah pusat. “BPNT Gemilang” berinovasi dengan menambahkan kebutuhan dasar yang menjadi salah satu kontributor garis kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, yakni minyak goreng.

Gagasan untuk menggabungkan strategi pusat dan daerah ini dicetuskan setelah Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Nelson Pomalingo menghadiri rapat koordinasi BPNT pemerintah pusat. Program “BPNT Gemilang” harus melalui banyak tahapan agar bisa diimplementasikan. Tahapan tersebut meliputi pembahasan alokasi anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, diskusi inisiatif “BPNT Gemilang” dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, serta penentuan inovasi program. Dalam hal ini, Bappeda Kabupaten Gorontalo dibantu TKPK daerah bersama-sama menentukan target populasi yang akan dicakup oleh “BPNT Gemilang” sesuai anggaran yang dialokasikan. Disepakati bahwa target penerima bantuan adalah rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan bantuan BPNT pemerintah pusat.

Sebagai perencana di daerah, Bappeda Kabupaten Gorontalo meyakini bahwa kemampuan membaca dan menganalisis data sangat krusial dalam menjamin program dan implementasinya tepat sasaran. Dengan dukungan dari TKPK dalam menyediakan basis data indikator kemiskinan, baik konsumsi maupun nonkonsumsi, serta asistensi dalam menganalisis dan memanfaatkan data, Bappeda Kabupaten Gorontalo merumuskan program dengan informasi dan analisis yang komprehensif, yang pada akhirnya memungkinkan untuk mengevaluasi penggunaan APBD yang lebih efisien.

Anggaran sekitar Rp1 miliar untuk 760 rumah tangga miskin di 19 kecamatan di Kabupaten Gorontalo yang difungsikan sebagai komplementer dari program BPNT, memungkinkan pemerintah daerah mengatasi masalah kemiskinan di daerah, terutama pada kaum lansia yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.

Menurut Victor Asiku, Kepala Bidang Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Gorontalo, “Kami tidak berpikir bahwa pemberdayaan ekonomi adalah strategi yang tepat untuk membantu masyarakat miskin yang berada pada Desil 1. Sehingga, bantuan pangan nontunai adalah cara yang lebih baik untuk menjamin kesejahteraan mereka.”

Kemampuan untuk menentukan penggunaan anggaran daerah secara efisien harus dimiliki oleh pemangku kebijakan guna menyelesaikan isu sosial-ekonomi seperti kemiskinan. Daripada menggunakan anggaran

daerah untuk memberdayakan masyarakat miskin di Desil 1 yang tingkat keberhasilannya sangat kecil, Bappeda Kabupaten Gorontalo memutuskan untuk memaksimalkan pemberdayaan di Desil 2, 3, dan 4, tanpa melupakan kewajiban untuk menjamin kesejahteraan penduduk miskin di Desil 1.

Selain dengan memenuhi kebutuhan dasar, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan perlu mempertimbangkan dimensi kemiskinan nonmoneter seperti pendidikan, yang memainkan peran penting dalam kehidupan individu dan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh saling terkaitnya dimensi kemiskinan, sehingga mengharuskan kebijakan dan program mengatasi setiap dimensinya agar masyarakat terhindar dari lingkaran setan kemiskinan. Dengan demikian, ketidakmampuan mengalokasikan sumber daya untuk dimensi kemiskinan nonmoneter dapat menghambat daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinannya secara efektif.

Salah satu program pemerintah daerah di bidang pendidikan adalah “Beasiswa Gemilang”, yang tujuan utamanya menjamin pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Program ini untuk mengarahkan anak-anak tersebut ke kehidupan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Selain beasiswa, pemerintah daerah juga menyediakan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi lulusan baru. Pemerintah Kabupaten Gorontalo percaya bahwa strategi ini dapat mengatasi tantangan di bidang ketenagakerjaan.

Pemerintah daerah memiliki tiga kewajiban utama dalam memerangi kemiskinan. Pertama, melindungi masyarakat miskin, khususnya mereka yang berada pada Desil 1, dari kelaparan dan kekurangan gizi melalui pemberian bantuan sosial. Kedua, memberikan jaring pengaman sosial untuk menjamin kebutuhan dasar nonkonsumsi masyarakat miskin. Terakhir, dan paling sulit, memberdayakan masyarakat miskin melalui program-program yang dapat mengangkat taraf hidup mereka.

Gorontalo merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan dianggap sebagai surga kuliner. Anehnya, di daerah dengan kekayaan berlimpah ruah ini tingkat kemiskinan dan ketimpangannya tinggi.

Keunggulan kompetitif tersebut tadi mestinya memungkinkan masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya jika pemangku kebijakan di daerah melihat potensi tersebut dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

Di Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah menyadari bahwa mempromosikan potensi lokal adalah landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat miskin. Salah satu jalan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk memaksimalkan potensi tersebut adalah melalui program “Dana Bergulir”.

Program “Dana Bergulir” bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Untuk itu, pemerintah daerah memberikan bantuan sebesar Rp1-2 juta untuk pengembangan UMKM oleh masyarakat miskin. Pada 2018, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berhasil mendukung 820 UMKM yang di 19 kecamatan di kabupaten tersebut. “Pada 2019, lebih dari 4.000 UMKM telah menerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah,” ujar C.R. Katilie, Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo.

Dalam menentukan masyarakat yang berhak diberi bantuan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo merujuk pada BDT dari TKPK di daerah. Data tersebut memungkinkan pemerintah daerah melakukan intervensi secara tepat dengan sasaran yang valid.

UMKM bukan satu-satunya yang diberikan dukungan. Pemerintah daerah pun memberdayakan berbagai usaha ultramikro yang perannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan sangat besar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Koperasi mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan usaha ultramikro.

Seperti UMKM, pemberdayaan usaha ultramikro dilakukan dengan memberikan bantuan berupa dana bergulir dengan menggunakan skema Grameen Bank di Bangladesh. Pembentukan kelompok usaha ultramikro didasarkan pada karakteristik bisnis serta lokasi geografis. Selanjutnya, sesama anggota kelompok saling memantau perkembangan bisnis masing-masing serta memastikan bahwa bisnis tersebut dijalankan sesuai pelatihan dari Dinas Koperasi.

Menurut Sekretaris Bappeda Kabupaten Gorontalo Bambang Suprianto, kunci keberhasilan program tersebut adalah kolaborasi antara pemangku kebijakan, dinas terkait, DPRD, TKPK, dan masyarakat. “TKPK adalah benteng pertahanan kami, yang memastikan bahwa Bappeda tetap di jalur yang benar dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan dengan selalu mempertimbangkan karakteristik masyarakat miskin di tingkat lokal sehingga dapat menentukan metode intervensi yang tepat,” kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menekankan peran TKPK pada perkembangan penurunan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. “Saat ini tingkat kemiskinan di wilayah kami telah meninggalkan angka 20 persen dan mencapai 19,4 persen. TKPK terus memberikan pengarahannya kepada kami mengenai cara mengalokasikan APBD secara efektif dan efisien untuk masalah-masalah kemiskinan di daerah,” ujarnya.

Tujuan akhir sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB 1, yakni “Mengakhiri Kemiskinan dalam Semua Bentuknya”, tidak akan tercapai jika pemerintah masih berpikir konvensional dan mengabaikan kondisi riil di masyarakat.

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Gorontalo lebih tinggi daripada tingkat nasional, pergeseran paradigma dari yang semula hanya mengandalkan bantuan sosial dan program nasional menjadi strategi pengentasan kemiskinan yang harus berdasarkan target populasi yang disasar, telah mempercepat upaya Kabupaten Gorontalo dalam menurunkan angka kemiskinan.

Terlepas dari prestasi yang dicapai Kabupaten Gorontalo dalam mengentaskan kemiskinan dan mengalokasikan anggaran, masalah yang paling mendesak dan belum juga terpecahkan adalah perbaikan terhadap target program anti-kemiskinan. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi yang dapat memastikan ketepatan sasaran dan kemudahan evaluasi program.

Membumikan strategi, mengalokasikan anggaran dengan baik dan efisien, serta menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, memberikan harapan kepada penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo bahwa mereka berada di tangan yang aman dan sedang menuju perbaikan taraf hidup.

Realisasi Otonomi Daerah Melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

Fakir miskin kerap menggantungkan nasib kepada rentenir. Hingga sekarang, praktik itu masih terjadi di daerah perdesaan dengan akses terhadap perbankan yang rendah. Dengan bunga yang sangat tinggi, para rentenir membelenggu peminjam yang tidak memiliki pilihan. Siklus ini tidak akan pernah terputus jika tidak ada intervensi. Di Kampung Seminai, Kabupaten Siak, Riau, ada sebuah contoh mengenai kebersamaan membangun desa dan tolong-menolong di masyarakat.

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) yang merupakan program dengan sumber pendanaan dari APBD Siak dan APBD Riau. Program yang kini bertransformasi menjadi BUMKampung tersebut menjadi jalan keluar bagi masyarakat Kampung Seminai untuk meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya. Kini, banyak peminjam yang naik tingkat dari pengelola lahan menjadi pemilik lahan. Bak oase di padang pasir, UED-SP membawa harapan bagi masyarakat Kabupaten Siak bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan.

Pembangunan ekonomi desa memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jika prioritas terus-menerus diberikan kepada daerah padat penduduk tanpa mempertimbangkan isu spasial, pemenuhan kebutuhan, serta aksesibilitas masyarakat yang daerahnya jauh dari jangkauan pemerintah, bagaimana keadilan sosial-ekonomi dapat tercapai?

Seluruh masyarakat, di mana pun mereka berada, berkontribusi terhadap kehidupan di sekitarnya dan terhadap negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, hak-hak masyarakat untuk mengakses fasilitas guna meningkatkan kapasitas diri dan taraf hidup harus dijamin oleh negara.

Pemerintah Provinsi Riau melihat bahwa daerah perdesaan di Riau tidak hanya menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, tetapi juga tidak terbukanya akses masyarakat miskin terhadap perbankan sehingga mereka terjatuh rentan. Bukannya membuat peminjam menjadi berdaya, pinjaman dari rentenir justru memperparah jurang antara yang kaya dan yang miskin di Provinsi Riau. Selama ini, kelemahan pengambil kebijakan dalam menentukan program pengentasan kemiskinan adalah kemampuan melihat permasalahan yang menghambat masyarakat miskin untuk naik tingkat.

Hal berbeda diperlihatkan oleh Provinsi Riau. Pada akhir 2008, Pemerintah Provinsi Riau menginisiasi program UED-SP yang beroperasi di beberapa daerah, salah satunya di Kampung Seminai, Kabupaten Siak. Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberantas akar kemiskinan desa.

Anggaran UED-SP bersumber dari APBD Kabupaten Siak dan APBD Riau dengan menggunakan mekanisme berbagi anggaran atau budget sharing. Hal ini memperlihatkan kolaborasi positif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mengatasi masalah fundamental kemiskinan di daerah.

Di Kampung Seminai ada banyak aktivitas ekonomi atau usaha yang berkembang berkat pinjaman dari UED-SP. Sebelum ada UED-SP, masyarakat di Kampung Seminai berurusan dengan “bank harian” yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Belum sempat

mengembangkan usahanya, modal dan keuntungan mereka malah dipakai untuk melunasi bunga yang tinggi tersebut.

Dengan adanya UED-SP, hingga akhir 2018, sudah ada 1.219 orang yang tertolong berkat jasa simpan-pinjam. Banyak dari mereka yang sebelumnya terjerat “bank harian” terbebas dari lilitan utang dalam waktu satu tahun sejak menabung dan meminjam di UED-SP.

Bukan hanya membantu mereka yang sebelumnya meminjam di “bank harian”, UED-SP juga merangkul nasabah yang baru bersentuhan dengan jasa keuangan. Muntiatun adalah salah seorang peminjam tetap UED-SP sejak jasa simpan-pinjam itu berjalan pada 2009. Sejak 1996, sehari-hari ia berjualan makanan seperti sate, soto, dan nasi bungkus. Sebelum UED-SP ada, ia berjualan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa penghasilan yang disisihkan untuk tabungan masa depan. Kala itu, ia tidak punya kesempatan untuk mengembangkan usahanya ke skala yang lebih besar lagi. Waktu itu, Muntiatun tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk meminjam di lembaga keuangan formal. Tertutupnya akses terhadap institusi keuangan tersebut membuat kurva kehidupan Muntiatun sebelum 2009 datar saja.

Ketika UED-SP dibentuk, Muntiatun mengajukan pinjaman Rp2 juta tanpa harus menyerahkan agunan. Kebijakan UED-SP untuk membolehkan pinjaman dalam jumlah kecil tanpa mengharuskan adanya jaminan sertifikat tanah memudahkan masyarakat Kampung Seminai mengembangkan usahanya. Kebijakan UED-SP bukan tanpa alasan. UED-SP menyadari bahwa kepercayaan adalah bagian fundamental dari institusi keuangan. Ketika kepercayaan antara lembaga dan nasabah bisa dibangun dan dipertahankan, manfaat dari keberadaan lembaga menjadi lebih terasa.

Lambat laun usaha Muntiatun berkembang. Dari semula ia hanya berjualan eceran, kini sudah membuka jasa katering kecil-kecilan sehingga bisa menambah penghasilan dan menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Dengan menyisihkan keuntungan usahanya Rp10 ribu per hari, Muntiatun tak hanya berhasil mengembangkan dagangannya, tetapi juga bisa membeli lahan untuk ditanami sawit. Dengan kepemilikan tanah tersebut, Muntiatun memiliki kesempatan untuk meminjam dalam

jumlah Rp30 juta dari UED-SP—yang kini telah berubah nama menjadi BUMKam Seminai Jaya—pada 2012. Berkat kepercayaan dan pinjaman Rp2 juta pada 2009, Muntiatun berhasil menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi dan berhasil memiliki lahan dari sebelumnya sebagai pengguna lahan.

Kepemilikan lahan adalah isu fundamental yang harus ditimbang dalam strategi pengentasan kemiskinan. Setelah masyarakat miskin terberdayakan oleh program seperti UED-SP, masih ada tujuan akhir yang harus dicapai, yaitu bagaimana agar mereka bisa mengalokasikan uangnya demi masa depannya. Ini, antara lain, dapat dicapai dengan kepemilikan lahan.

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan otonomi daerah yang diterapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jika ingin otonomi daerah berhasil, sudah sepantasnya kita memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan daerah sendiri. Itulah sebabnya UED-SP berangkat dari perspektif mikro. Perputaran uang UED hanya terjadi di Kampung Seminai. Begitu pula di desa-desa lain. Maka, kesejahteraan masyarakat Kampung Seminai menjadi tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Sebelum seluruh masyarakat Kampung Seminai sejahtera, tugas pemerintah daerah belum selesai.

Muntiatun bisa saja memindahkan uangnya ke bank dengan bunga tabungan yang lebih tinggi. Namun ia sangat percaya dengan sistem BUMKam Seminai Jaya yang tidak menyulitkan calon peminjam. “Dibandingkan dengan pinjam di bank, di sini tidak ribet. Tidak harus survei, sertifikat nama asli, yang penting kenal orangnya, jujur bayarnya, langsung dikasih pinjaman,” kata Muntiatun.

Keunggulan lain BUMKam Seminai Jaya adalah periode penarikan dana. “Kami di sini sistemnya sudah melebihi bank. Masyarakat bisa mengambil uang kapan saja dan dalam jumlah berapa pun. Kami siap membantu,” ujar Nurmias, Kepala Unit UED-SP.

Keberhasilan unit simpan pinjam BUMKam Seminai Jaya dapat dilihat dari tingkat pembayaran kembali (repayment rate) yang mencapai 100 persen.

Bukan hanya disebabkan oleh sistem, tetapi juga berkat pemahaman para peminjam mengenai dana bergulir. “Para peminjam sadar bahwa ini adalah pinjaman dana bergulir dan orang lain nanti butuh juga,” kata Salah, Kepala Desa Seminai. Dengan bunga pinjaman 1,5 persen per bulan dan bunga tabungan 0,5 persen per bulan, jumlah dana bergulir dan tabungan di unit simpan pinjam BUMKam Seminai Jaya mencapai masing-masing Rp22 miliar dan Rp6 miliar.

Perubahan UED-SP menjadi BUM Kampung pada 2012 bukan hanya karena terkait dengan institusi, tetapi juga bertambahnya kegiatan. Tidak simpan-pinjam, namun juga mencakup unit usaha seperti Unit Kreasi Bunda Seminai, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan unit usaha BRILink.

Unit usaha BRILink adalah jasa transfer transaksi ke bank bagi masyarakat melalui perantara BUMKam Seminai Jaya. Banyak nasabah yang bermaksud mentransfer uang kepada sanak saudara yang berada di Jawa atau Kota Pekanbaru.

Maka BUMKam Seminai Jaya memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan unit usaha BRILink. Jasa lain yang disediakan adalah penjualan pulsa dan listrik. “Pendapatan dari unit ini cukup besar. Satu tahun bisa mencapai Rp30 juta,” kata Nurmias.

Usaha yang dijalankan BUMKam Seminai Jaya membantu memenuhi kebutuhan sanitasi, pendidikan, dan standar hidup, yang ketiganya merupakan bagian dari kemiskinan multidimensi. Tak dapat dimungkiri, keputusan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran daerah untuk pengembangan ekonomi perdesaan kini memperlihatkan hasil yang menakjubkan.

Kemiskinan Provinsi Riau berada di angka 7,21 persen per September 2018. Ini, antara lain, tidak dapat dilepaskan dari peran BUMKam Seminai Jaya. Seperti bunglon laut, unit usaha ini terus berproses untuk menyesuaikan layanannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung Seminai yang beragam dan terus meningkat. Ini merupakan angin segar bagi pengentasan kemiskinan di perdesaan melalui pengembangan usaha mikro dan pemenuhan layanan masyarakat, sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah mulai memahami apa yang dibutuhkan desa untuk maju.

Pengarusutamaan Gender dalam Pengentasan Kemiskinan: Menghilangkan Diskriminasi dengan Menghadirkan Prioritas

Pengkotak-kotakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari menyemen jenis gender di dalamnya. Mengerjakan pekerjaan rumah, mengasuh anak, hingga menjalankan profesi tertentu kuat asosiasinya dengan aktivitas feminin. Padahal setiap warga negara berhak melakukan apa yang dikehendakinya tanpa dibatasi oleh gendernya. Hal tersebut bernilai positif jika yang terjadi bukanlah diskriminasi melainkan prioritas.

Mengacu pada data *employment to population ratio* pada 2018 yang membandingkan jumlah perempuan usia angkatan kerja terhadap jumlah populasi, pada setiap 100 perempuan produktif hanya ada 53 yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Perempuan harus diangkat derajatnya dan diberikan prioritas dalam pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi inklusif akan tercapai. Inilah yang memotivasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menginisiasi program “Jalin Matra” pada 2015 guna membuktikan kehadiran negara dalam pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan perempuan.

“Jalin Matra” adalah program yang sarat akan pemberdayaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyadari bahwa bantuan sosial bak sebuah pelampung, yang membuat penduduk miskin tidak tenggelam ke dasar laut untuk sementara waktu. Ketergantungan terhadap bantuan sosial kian menjadi-jadi ketika masyarakat dihadapkan pada situasi tidak terduga seperti krisis ekonomi atau bencana alam, yang membuat penduduk miskin terbenam dalam kesengsaraan. Padahal masyarakat miskin, sama dengan kelompok ekonomi lainnya, memiliki banyak potensi dalam meningkatkan taraf hidup. Gagasan inilah yang melahirkan “Jalin Matra” sebagai program berbasis pemberdayaan untuk mengatasi feminisasi kemiskinan.

Perempuan bukan satu-satunya subjek sasaran program “Jalin Matra”. Jika hanya perempuan, program ini sama saja antitesis dari kesetaraan gender itu sendiri. Program “Jalin Matra” memiliki tiga misi, yaitu penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK), penanggulangan kerentanan kemiskinan (PK2), dan bantuan rumah tangga sangat miskin (RTSM). Jika PFK secara khusus menyasar perempuan, dua misi lainnya diprioritaskan untuk gender tertentu.

Frasa “feminisasi kemiskinan” menjadi pilihan oleh Dr. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2009-2019, untuk menggambarkan visi besar dari Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera yang disingkat menjadi Jalin Matra. PFK secara khusus bertujuan untuk memberdayakan kepala rumah tangga perempuan (KRTP) miskin dan rentan miskin yang berada pada usia produktif (15-64 tahun).

Dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang, para penerima bantuan yang merupakan KRTP berembug untuk menentukan jenis usaha kelompoknya. Hal inilah yang membedakan “Jalin Matra” dengan “Jalin Kesra”. Pada “Jalin Matra”, diskusi merupakan kendaraan utama untuk sampai pada keputusan akhir. KRTP dituntut untuk menyampaikan pendapatnya mengenai bidang usaha yang layak dan berpotensi untuk dijalankan oleh kelompoknya.

Hasilnya, para perempuan tersebut makin terasah kemampuannya dalam mengambil keputusan, yang secara tidak langsung berkontribusi pada

tercapainya misi “Jalin Matra”, yakni “*nguwongke wong*” (memanusiakan manusia). Dengan menggali potensi penerima bantuan “Jalin Matra” dan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan, program ini berhasil mengaktualisasikan berbagai pemberdayaan perempuan.

Untuk mencapai tujuan utamanya, yakni penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK), target sasaran PFK “Jalin Matra” adalah KRTP dengan status kesejahteraan rendah. Adapun untuk memastikan ketepatan sasaran program, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur selaku pelaksana program dibantu dengan beberapa organisasi perangkat daerah menggunakan data “*by name by address*” berdasarkan BDT Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2015. Penerima manfaat berdasarkan data BDT tersebut kemudian diverifikasi melalui rembung warga.

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan feminisasi kemiskinan tercermin dari alokasi anggaran program “Jalin Matra”. Berbeda dengan “Jalin Kesra” yang bantuannya lebih banyak berupa barang, pada “Jalin Matra” bantuan untuk penanggulangan feminisasi kemiskinan diberikan dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp2,5 juta yang ditransfer ke rekening bank penerima bantuan.

Jika dijumlahkan, nilai bantuan tunai untuk PFK mencapai sekitar Rp200 miliar, atau Rp50 miliar setiap tahunnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membutuhkan kolaborasi aparat di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa untuk memastikan ketepatan penggunaan bantuan tersebut. Untuk itu, pada program “Jalin Matra”, setiap kelompok penerima manfaat memiliki pendamping sebagai pengelola program di tingkat desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga terus memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola program di setiap tingkatan untuk memastikan kesepahaman visi dan misi program, yakni pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha ekonomi produktif.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menunjukkan bahwa ada 152.343 KRTP di Jawa Timur yang berhak mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah. Namun, hanya 76.283 KRTP yang memenuhi kriteria dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur yang bisa mendapatkan bantuan. Adapun 76.060 lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Di sini peran pemerintah kabupaten dan kota dituntut untuk bersama-sama menekel feminisasi kemiskinan dengan menangani mereka yang tidak difasilitasi oleh provinsi. Kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur dalam memerangi feminisasi kemiskinan menjadi kunci dan layak dijadikan contoh. Ketika ada sinkronisasi program dalam satu wilayah geografis yang sama, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah kota, maka alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan tumpang-tindih program provinsi dan kabupaten/kota dapat dihindari.

Layaknya program estafet pada umumnya, ada kesamaan antara program “Jalin Kesra” dan “Jalin Matra”. Namun membumikan isu gender pada pengentasan kemiskinan menjadi pembeda utama di antara keduanya. Selain itu, “Jalin Matra” sudah memasukkan pendekatan kemiskinan multidimensi dalam menentukan target sasaran. Bukan hanya rumah tangga miskin (Desil 1) yang berhak mendapatkan bantuan, melainkan juga mereka yang rentan untuk jatuh ke dalam keterpurukan (Desil 2 dan 3).

Selain 76.283 KRTP, program “Jalin Matra” juga menyalurkan bantuan ke rumah tangga di Desil 2 dan 3, yakni mereka yang mudah menjadi miskin ketika bersentuhan dengan kondisi sosial-ekonomi yang tidak menentu. Program “Jalin Matra” juga menyalurkan bantuan kepada 42.857 rumah tangga sangat miskin dalam bentuk barang yang kemudian dijadikan modal usaha.

Melihat tren angka kemiskinan Jawa Timur selama lima tahun terakhir, ada penurunan yang cukup signifikan, yakni dari 12,28 persen pada September 2014 menjadi 10,85 persen pada September 2018. Prestasi ini tidak bisa dilepaskan dari pengarusutamaan gender dalam berbagai program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan dan penanganan masyarakat yang rentan miskin. Berkat “Jalin Matra”, para kepala rumah tangga perempuan atau KRTP yang sebelumnya dihadapkan pada kekurangan kalori, kini dapat memenuhi kebutuhan kalori seperti rumah tangga lainnya.

“Jalin Matra” adalah contoh program yang berhasil merevisi sistem, model pendekatan, dan arah tujuan bantuan sosial yang selama ini membuat penduduk miskin terus berada di “zona nyaman”-nya. Ketika berbicara perihal kemiskinan, efektivitas menjadi lebih penting daripada efisiensi. Segala upaya akan nihil jika masyarakat penerima manfaat hanya berhasil bertahan hidup tanpa meningkatkan taraf hidupnya. Efektivitas “Jalin Matra”, khususnya PFK, dapat tercapai karena pemerintah selaku eksekutor program berhasil keluar dari paradigma pembangunan yang selama ini berorientasi pada bantuan sosial. Inilah contoh kebijakan yang memastikan bahwa masyarakat miskin, termasuk di dalamnya perempuan, dapat memperoleh akses bantuan untuk pemberdayaan mereka tanpa mengurangi kehendaknya dalam menyuarkan keinginannya dalam hidup.

“Jalin Matra” dapat pula diartikan sebagai “*think outside the box*” atau berpikir di luar kebiasaan. Ini mencerminkan pola pikir Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi feminisasi kemiskinan yang tercermin dari alokasi anggaran yang “*pro-poor*”, “*pro-job*”, dan “*pro-gender*”. Maka tidak mengherankan jika *United Nations Public Service Awards* (UNPSA) 2018—penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa—menominasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur untuk kategori “*Promoting Gender Responsive Public Services to Achieve the SDGs*”.

Urban farming: Mesin Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan Sosial di Perkotaan

Pemerintah Kota Bandung memahami urgensi pemenuhan nutrisi penduduk Kota Bandung sebagai langkah kecil yang dapat membawa ke tujuan akhir, yakni pengentasan kemiskinan. Pertanian, yang selama ini kerap diasosiasikan dengan daerah perdesaan, ternyata menjadi solusi permasalahan pangan di perkotaan. *Urban farming*, atau pertanian perkotaan, menjadi bagian utama dari solusi ketahanan pangan Kota Bandung. Hingga akhir 2018, sudah ada lebih dari 1.000 Rukun Warga yang menjadi produsen sayuran. Dengan bantuan bibit dari pemerintah melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang hanya bersumber dari APBD, kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya meningkat. Program kampung berkebun adalah wujud kesadaran pemerintah untuk keluar dari kebiasaan berpikir jangka pendek dalam mengatasi masalah fundamental seperti ketahanan pangan.

Perlahan-lahan tapi pasti, pemerintah kini melebarkan cakrawalanya dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan. Bahwa masyarakat yang masih bisa berdaya lebih baik dioptimalkan melalui program-program pemberdayaan, dibandingkan dengan sokongan bantuan sosial yang tak menjanjikan keberlanjutan dampak.

Realitas yang umumnya terjadi di wilayah urban adalah meningkatnya penggunaan lahan untuk permukiman penduduk. Sementara itu, industrialisasi makin menggerus hasrat masyarakat untuk menggeluti bidang pertanian atau perkebunan yang sebenarnya sangat penting untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Kota Bandung, layaknya daerah perkotaan pada umumnya, menghadapi dua masalah utama dalam pembangunan: laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kebutuhan pangan yang makin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pada isu pertama, Pemerintah Kota Bandung berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk per tahun, yakni dari 0,64 persen pada 2012 menjadi 0,29 persen pada 2017. Namun jumlah penduduk juga terus meningkat. Artinya, pemerintah perlu memecahkan isu ketahanan pangan dengan cara yang solutif dan rasional, yang didasarkan pada karakteristik sosial-budaya serta geografis Kota Bandung.

Garis Kemiskinan atau GK Kota Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, batasnya adalah Rp353.423 Sedangkan pada 2018 berada di angka Rp448.902 Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi serta faktor iklim yang menyebabkan kian sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan.

Misalnya, dalam satu hari, warga Kota Bandung membutuhkan 600 ton beras untuk konsumsi. Sebelumnya, pemenuhan kebutuhan tersebut digantungkan pada daerah perdesaan. Memang, luas lahan yang lebih besar serta kemampuan bertani masyarakat desa merupakan keunggulan kompetitif wilayah perdesaan. Namun hal itu tidak berarti seluruh kebutuhan pangan hanya dapat dipenuhi oleh desa. Dengan jumlah penduduk yang tinggi dan kebutuhan pangan yang besar, wilayah urban harus mampu menjadi produsen hasil pertanian/perkebunan dengan dapat menggunakan keunikan perkotaan.

Enam tahun silam, tepatnya pada 2013, Pemerintah Kota Bandung mulai menyadari pentingnya menurunkan ketergantungan terhadap desa dalam upaya menciptakan ketahanan pangan warga Kota Bandung. Tidak lahan kosong di pekarangan rumah masyarakat atau di setiap RW dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian/perkebunan. Namun

pemerintah juga menyadari sulitnya mewujudkan kemandirian pangan jika pemahaman dan kapasitas masyarakat akan pertanian perkotaan masih lemah. Oleh karena itu, pada tahun yang sama, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pangan dan Pertanian menjalankan program pelatihan kampung berkebun. Tujuan utamanya untuk memberdayakan masyarakat dari rumah tangga miskin dan rumah tangga sangat miskin dalam mempelajari lebih lanjut praktik urban farming.

Setelah pemahaman masyarakat meningkat, barulah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung menjalankan program tersebut secara masif. Program dimulai sejak 2014 dan masih berlanjut hingga saat ini.

Dalam kerangka berpikir Dinas Pangan dan Pertanian, masyarakat menggunakan setiap jengkal lahan kosong untuk tanam-menanam. Produktivitas lahan harus ditingkatkan demi menciptakan manfaat ekonomi substansial, yang tidak hanya menyentuh lingkup masyarakat sebagai pelaku utama, tetapi juga untuk perekonomian Kota Bandung. Hal ini karena urban farming berkorelasi positif dengan meningkatnya produksi hasil pertanian yang tak hanya memenuhi kebutuhan dasar sehingga mengurangi pengeluaran, tetapi juga untuk memasok sayuran di pasar sehingga dapat meningkatkan arus ekonomi Kota Bandung.

Menumbuhkan budaya menanam bukan satu-satunya misi yang diemban untuk menyukseskan program urban farming. Banyak masyarakat yang memiliki keinginan untuk bertani atau berkebun, namun tidak memiliki bibit yang dibutuhkan untuk tanam-menanam.

Maka, Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan tahunan, yakni Bandung Agri Market, yang bertujuan mempromosikan hasil pertanian urban farming dan membagikan ratusan bibit pertanian secara gratis kepada masyarakat. Hingga 2019, sudah ada lebih dari 1.000 RW yang menjadi basis produksi hasil perkebunan dan pertanian sehingga kota berpenduduk 2,5 juta jiwa ini bisa memenuhi kebutuhannya tanpa tergantung pada wilayah lain.

Urban farming membuat warga Kota Bandung mampu menyediakan pangan, khususnya sayuran, untuk skala rumah tangga. Selain memenuhi kebutuhan pangan, Pemerintah Kota Bandung juga memikirkan

bagaimana menjamin hasil produksi pertanian dan perkebunan tersebut tidak terkontaminasi zat-zat berbahaya. Untuk itu, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung menggagas Mini Lab Food Security di 33 pasar tradisional dan 61 pasar modern yang dikelola oleh delapan holding company, untuk memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan tidak terkontaminasi zat-zat berbahaya. Inovasi ini telah memperoleh pengakuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai “Top 40 Inovasi Pelayanan Publik” pada 2018. Penanggulangan kemiskinan harus benar-benar menyasar permasalahan. Pemerintah harus bisa melihat dari kacamata mikro apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dasar di masyarakat dan bagaimana memecahkan masalah secara tepat sasaran.

Urban farming yang digagas oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung menjadi solusi dalam menciptakan keamanan pangan bagi masyarakat miskin perkotaan. Program ini mengurangi hambatan transportasi dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat yang kemudian menggeluti bidang ini.

Dinas Pangan dan Pertanian juga memastikan bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan utama urban farming, peralatan utama untuk bertani dan berkebun harus dapat diakses, terjangkau, dan inklusif. Dukungan dari pemerintah daerah, penerapan perencanaan kota yang berkelanjutan, dan dimasukkannya ketahanan pangan ke dalam kebijakan publik, akan mengurangi kendala kaum miskin kota dalam menanam hasil bumi.

Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan menjamin hasil produksi aman dikonsumsi, urban farming dapat mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini yang menjadikan urban farming sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan.

Tidak semua orang memiliki akses ke makanan yang terjangkau dan sehat. Banyak masyarakat yang konsumsinya jauh di bawah garis kemiskinan dan berbagai program jaminan sosial tidak akan menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas. Pemerintah harus membantu menyelesaikan masalah ini, namun dalam jangka panjang masyarakat harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Urban farming dapat menjembatani kesenjangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Urban farming sering diasosiasikan dengan kaum elite perkotaan yang ingin berkebun untuk mengisi waktu luang. Padahal fakta menunjukkan dampak signifikan yang dapat diciptakan urban farming terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin Kota Bandung terus menurun dari 4,65 persen pada 2014 menjadi 3,57 persen pada 2018. Demikian juga serta indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang menurun dari 0,69 pada 2014 menjadi 0,48 empat tahun kemudian. Semua pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan Pemerintah Kota Bandung dalam menyelaraskan intervensi pengentasan kemiskinan di tiga dimensi kemiskinan, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan.

Mewujudkan Falsafah Perekonomian Indonesia dengan Teknologi Pro-Kemiskinan

“Kaku” adalah kata yang kerap diasosikan dengan cara kerja pemerintah. Tujuan pembangunan yang makin menumpuk tidak dibarengi dengan kepesatan pencapaiannya. Sebagai agen perubahan, pemerintah daerah harus bisa melacak potensi-potensi instrumen yang dapat mengakselerasi pencapaian misi besar negara dalam Pasal 34 UUD 1945—bahwa negara wajib memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Di ibu kota Provinsi Jawa Barat, berbagai gebrakan dirumuskan dan dijalankan agar seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat perekonomian serta saling membantu di antara mereka. Berawal dari data yang menunjukkan kontribusi besar bantuan beras terhadap garis kemiskinan dan data penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) yang tidak mencakup seluruh warga miskin, Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran untuk membuat “ATM Beras”, inovasi berbasis teknologi karya seorang putra daerah yang prihatin terhadap keadilan sosial di tanah kelahirannya.

Pangan menjadi salah satu aspek krusial dalam pengentasan kemiskinan yang bersifat multidimensi. Kebutuhan dasar masyarakat miskin harus dipenuhi sebelum mereka menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika pemerintah gagal dalam memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat tidak akan memiliki energi untuk beraktivitas sehingga tidak mampu menghasilkan pendapatan. Akibatnya, daya beli menurun, jumlah barang yang diproduksi dalam negeri menurun, pajak yang diterima pemerintah rendah, sehingga berakibat pada perekonomian secara makro. Maka, pengentasan kemiskinan menjadi kian lamban.

Sebab itu, pemerintah perlu memikirkan agar kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan rumah tangga sangat miskin dapat terpenuhi. Program bantuan pangan nontunai (BPNT) atau raskin dari pemerintah pusat belum mencakup seluruh masyarakat yang berhak menerima bantuan karena tidak tercatat identitasnya dalam data resmi pemerintah. Juga, keterbatasan anggaran pemerintah pusat untuk mendistribusikan BPNT kepada kaum duafa.

Untuk mengisi bolong dari BPNT, Bappelitbang Kota Bandung sebagai perencana program pembangunan berusaha mengakomodasi inovasi yang lahir dari masyarakat. Salah satu ide cemerlang tersebut adalah “ATM Beras”, inovasi yang berasal dari kreativitas salah seorang alumni Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung angkatan 1987, Budi Adji, pada akhir 2016. Tahun tersebut adalah tahun euforia “the internet of things”, era masyarakat makin melek teknologi dan dapat merasakan manfaat langsung dari kemudahan teknologi.

Anjungan tunai mandiri atau ATM diciptakan untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan haknya. Bank wajib memberikan uang milik nasabah kapan saja nasabah membutuhkan. Namun bank, dengan jumlah cabang dan sumber daya manusia yang terbatas, tidak mampu melayani kebutuhan nasabah yang beragam. Tak hanya tarik dan setor tunai, melainkan juga keperluan lainnya. Dengan adanya ATM, bank dapat menjamin pelayanan terpenuhi secara efektif.

Analogi itu berlaku juga untuk “ATM Beras”. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Namun dengan sumber daya yang terbatas, penyaluran pangan seperti beras akan menguras waktu dan

anggaran yang tidak sedikit. Pengadaan “ATM Beras” di wilayah-wilayah tempat masyarakat miskin bermukim menjamin pemenuhan hak-hak mereka secara lebih efisien.

Tantangan terbesar dalam implementasinya adalah bagaimana penerima bantuan, terlepas dari kecakapannya terhadap teknologi yang masih rendah, dapat tetap menggunakan inovasi ini. Untuk itu, tidak seperti ATM bank yang mengharuskan pemiliknya menggunakan kode identifikasi personal atau PIN, “ATM Beras” cukup menggunakan radio-frequency identification atau RFID. Dengan menempelkan kartu di bagian tengah muka mesin, dua liter beras langsung didapat.

Program yang dijalankan sejak 2018 ini memberikan manfaat terhadap setidaknya 1.100 kepala keluarga miskin melalui enam “ATM” yang ditempatkan di lima masjid dan satu gereja. Penerima bantuan adalah mereka yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial, yakni berdasarkan data BDT sebanyak 60 persen dan sisanya warga miskin terdekat. Untuk memastikan bahwa masyarakat miskin terdekat juga menerima manfaat, camat dan lurah dikerahkan untuk mencatat warga kurang mampu yang tidak terlindungi program BPNT. Sedangkan untuk memastikan ketersediaan beras, Dinas Pangan dan Pertanian bekerja sama dengan Bulog. Setiap warga miskin mewakili satu KK berhak untuk mengambil beras sebanyak 10 kilogram kualitas premium per bulan menggunakan kartu “ATM Beras”.

Pemerintah Kota Bandung membuka pintu bagi masyarakat mampu yang ingin berkontribusi dalam program ini. Mereka dapat menyumbang dalam bentuk beras atau uang yang akan digunakan untuk membeli beras. Dengan bantuan dari masyarakat mampu, anggaran Pemerintah Kota Bandung lebih banyak terserap untuk pengadaan “ATM Beras”. Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan Rp33 juta per mesin atau sekitar Rp5 miliar untuk seluruh jumlah mesin yang harus disediakan dalam rangka memenuhi target pengadaan jumlah “ATM Beras” yang diharapkan. Meskipun pengadaan program ini menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, “ATM Beras” merupakan infrastruktur yang dapat digunakan dalam jangka panjang serta dampaknya langsung dirasakan oleh kaum duafa.

Pemerintah Kota Bandung memilih tempat ibadah sebagai lokasi “ATM Beras” telah dipikirkan masak-masak. Setelah shalat subuh di masjid atau selepas ibadah di gereja, warga miskin diberi nasihat oleh pemuka agama bahwa kemiskinan adalah nasib yang dapat diubah. Sehingga, selain menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dengan memanfaatkan teknologi, hal ini juga untuk memberikan pengertian kepada mereka agar tidak terus-menerus bergantung kepada pemerintah.

Warga yang menerima bantuan beras melalui “ATM Beras” juga mendapat rekomendasi pinjaman Kredit Masjid Sejahtera atau Mesra dengan nilai maksimal Rp30 juta. Strategi ini membuktikan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk membantu warganya yang kurang mampu agar bisa keluar dari jurang kemiskinan. Dengan dibukakannya pintu terhadap pinjaman mikro, masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya. Sehingga, dampak dari “ATM Beras” tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga terhadap peningkatan kualitas hidup kaum duafa melalui nasihat serta pinjaman kredit eksklusif untuk penerima bantuan program “ATM Beras” dari tempat ibadah.

“ATM Beras” adalah satu dari beberapa cetak biru yang berhasil diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam ikhtiarnya memenuhi hak-hak dasar warganya. Inovasi Pemerintah Kota Bandung merupakan cerminan dari pemanfaatan teknologi dalam mengentaskan kemiskinan secara tepat sasaran.

Berdagang Lintas Batas: Ekspansi Pasar untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa

Batas menjadi penghambat tercapainya tujuan atau target besar yang diharapkan. Mengurangi batas artinya meningkatkan ruang untuk tumbuh. Abad ke-21 menjadi era bertemunya pemisah dan penyatu. Di satu sisi, integrasi ekonomi regional dielu-elukan. Tapi di sisi lain, praktik deglobalisasi dan kebijakan proteksionisme kian populer. Pada hakikatnya kedua pendekatan ini memiliki niat yang sama: untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara dengan memanfaatkan metode dan peluang yang dimiliki. Keduanya tidak ingin menciptakan ketergantungan berlebihan pada wilayah lain.

Perekonomian Indonesia sedang diguncang oleh melemahnya perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi masih terperangkap pada level 5 persen, yang juga tercermin dari defisit neraca perdagangan Januari-Februari 2019 yang mencapai US\$0,73 miliar dan jumlah ekspor dan impor kumulatif pada periode tersebut yang masing-masing berjumlah US\$26,46 miliar dan US\$27,19 miliar. Maka, prioritas ekonomi Indonesia saat ini adalah menggenjot ekspor dan menekan impor, sehingga dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Ekspor sangat bergantung pada keunggulan kompetitif Indonesia, yang juga bergantung pada potensi di wilayah. Setiap daerah memiliki produk unggulannya dan jika benih-benih unggul tersebut dimaksimalkan, perbaikan kesejahteraan akan tercapai dan kondisi ekonomi makro Indonesia digdaya.

Kabupaten Banyumas yang dikenal sebagai sentra industri gula merah, mengoptimalkan penjualan gula kristal untuk meningkatkan pendapatan para penderes kelapa yang taraf hidupnya tak kunjung meningkat karena menghadapi lemahnya daya beli. Fenomena perubahan gaya hidup sehat di berbagai belahan dunia merupakan peluang untuk memasarkan gula kristal yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Dengan memformulasikannya dalam bentuk kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, ini jalan keluar untuk meningkatkan rendahnya pendapatan para penderes kelapa.

Kabupaten Banyumas mengalokasikan sekitar Rp12 miliar dana APBD 2018 untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri, yang di dalamnya termasuk pembinaan dan pelatihan usaha pengolahan gula kelapa kristal yang melibatkan 27.000 orang. Penganggaran yang tujuan awalnya sekadar memanfaatkan potensi daerah ini ternyata dapat meningkatkan kehidupan petani, yang semula pasarnya dibatasi oleh jarak, kini dapat melampaui jarak.

Melemahnya ekonomi nasional yang ditengarai disebabkan oleh gejolak ekonomi global juga berdampak pada mata pencaharian penduduk di daerah, khususnya pengusaha dan petani, yang menggantungkan nasib pada daya beli penduduk lokal. Pendapatan yang menurun akan memengaruhi konsumsi masyarakat dan pada akhirnya berkontribusi pada angka kemiskinan daerah.

Lesunya perekonomian memang berdampak pada merosotnya pendapatan para pengusaha dan petani. Namun di sisi lain gejolak ekonomi global yang sedang dihadapi dunia dan menyebabkan rupiah melemah, mengilhami Kabupaten Banyumas untuk tidak terpaku pada pasar domestik. Menurut Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Juni Setijarsih, mereka justru berpikir untuk membawa produk-produk unggulan daerah ke mancanegara.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian 2016, industri makanan dan pengolahan berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap ekspor Indonesia. Industri pengolahan terus mengalami peningkatan ekspor hingga 35,35 persen pada 2016. Peningkatan ekspor industri pengolahan memberikan sinyal bahwa produk makanan dan olahan yang dihasilkan Indonesia makin diminati oleh pasar internasional

Salah satu produk olahan yang menjadi unggulan Kabupaten Banyumas adalah gula kelapa kristal, yang dihasilkan oleh para penderes gula kelapa. Meskipun memiliki sumber daya melimpah dan kemampuan yang baik dalam mengolahnya, hal tersebut akan percuma jika ceruk pasar yang disasar menghadapi kesulitan keuangan. Untuk itu, penting bagi pelaku usaha untuk menyasar segmen yang sama di lokasi yang berbeda, yang memiliki daya tinggi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas menyadari besarnya nilai ekonomi yang dapat diciptakan dengan memasarkan gula kristal ke negara-negara yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalokasikan anggarannya untuk membina usaha pengolahan gula kelapa serta mendapatkan sertifikasi organik dari lembaga sertifikasi Control Union.

Dalam dua tahun terakhir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengalokasikan hampir Rp 28 miliar untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri, termasuk program untuk menggenjot ekspor. Hingga kuartal I 2019, sudah ada 27.000 orang yang berhasil diberdayakan.

Peningkatan jumlah produksi gula kristal berkat ekspansi pasar tidak hanya berdampak pada para penderes dan pengolah yang menjadi pelaku usaha, tetapi juga pada penyerapan angkatan kerja, yang sebagian besar berpendidikan menengah ke bawah—yang selama ini mendominasi jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banyumas. Dampak ekspor yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada akhirnya dapat menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Banyumas.

Selain perluasan lapangan kerja, ekspansi pasar ini memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menjual produknya di atas harga pasar lokal. Pada akhirnya, pertumbuhan pendapatan ini berdampak pada kehidupan para petani kristal yang selama ini mata pencahariannya terkendala oleh daya beli domestik yang melemah.

Hingga kini, Banyumas masih berada pada zona merah kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan per 2018 mencapai 13,50 persen dibandingkan dengan angka nasional 9,66 persen. Namun, jika melihat tren angka kemiskinan yang terus menurun dengan signifikan, juga pertumbuhan ekonomi yang melebihi capaian nasional, dapat disimpulkan bahwa Banyumas tidak melihat gejolak ekonomi global sebagai ancaman namun justru sebagai peluang.

Dengan mendorong ekspor gula kristal, Pemerintah Kabupaten Banyumas ingin mencapai misi besarnya, yakni menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di wilayahnya. Strategi pengentasan kemiskinan yang bersifat makro inilah yang menjadi solusi utama mengakhiri lingkaran setan kemiskinan. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, kesejahteraan keluarga akan meningkat, yang memungkinkan mereka untuk membiayai kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Daripada hanya bergantung pada jaminan sosial untuk mengentaskan kemiskinan, Kabupaten Banyumas menjalankan strategi yang terukur yang dapat menjadi acuan bagi daerah-daerah lain. Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh tiga dimensi utama kemiskinan, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan, tetapi juga faktor-faktor ekonomi makro, yang langkah mengatasinya dapat dirumuskan dengan rasional. Dengan berangkat dari permasalahan yang dihadapi dan kemudian menerjemahkan potensi lokal sebagai strategi untuk sejahtera dengan kemandirian, Kabupaten Banyumas dapat merealisasikan tujuan pembangunan daerahnya.



Epilog

April 2019

Ketika pembaca tiba pada akhir cerita, maka selanjutnya tergantung sepenuhnya pada imajinasi pembaca. Bisa jadi pembaca akan membayangkan hal yang berbeda-beda.

Tapi kali ini berbeda.

Para pembaca buku ini adalah rakyat Indonesia, yang mengharapkan hal yang sama dari pemerintah. Sebagai pemeran utama dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah adalah tokoh yang tidak akan pernah mati. Ia akan terus menjadi tempat masyarakat bersandar. Maka, wajar bila rakyat mengharapkan pemerintah dapat diandalkan dalam kondisi dan situasi apa pun.

Otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program yang dapat menysar isu-isu penting yang dihadapi di masyarakat. Apa yang telah dilakukan Kabupaten Gorontalo dalam mengatasi tingginya prevalensi *stunting* dengan inovasi program yang merujuk pada permasalahan lokal, pemberdayaan ekonomi oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan UED-SP, penyadaran gender dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, penanggulangan isu pangan di wilayah urban oleh Pemerintah Kota Bandung dengan pertanian perkotaan dan “ATM Beras”, serta pemberian jaminan pendidikan melalui Kartu Banyumas

Pintar (KBP) oleh Pemerintah Banyumas, merupakan contoh konkret bagaimana keberpihakan itu bisa dihadirkan pemerintah daerah melalui alokasi anggaran yang *pro-poor* atau pro-kemiskinan dan *pro-job* atau pro-penciptaan lapangan kerja.

Namun masih banyak perencanaan dan penganggaran yang harus diperbaiki untuk menajamkan program pengentasan kemiskinan. Pertama, pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Sudah saatnya pemerintah daerah memiliki dan merancang strategi yang memberdayakan, yang membuat masyarakat yang benar-benar ingin keluar dari kemiskinan bisa melakukannya dengan usaha mereka sendiri. Misalnya, dengan menyalurkan pinjaman untuk UMKM seperti konsep Grameen Bank di Bangladesh.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah tidak harus berjuang sendiri. Potensi kerja sama dengan swasta melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR harus dimanfaatkan. Kolaborasi inilah yang dapat mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan yang multidimensi. Pada hakikatnya kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi seluruh masyarakat.

Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah urgensi untuk melihat angka kesenjangan sebagai salah satu indikator perumusan program. Program-program yang sifatnya jaminan sosial atau bantuan sosial, hanya akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, namun tidak menurunkan kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Pemerintah daerah harus memiliki pola pikir perencanaan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada di era *internet of things* ini. Ada banyak sekali teknologi yang dapat membantu pemerintah meningkatkan inklusi keuangan, menghadirkan keadilan ekonomi, serta menciptakan efisiensi. Sebut saja teknologi *blockchain* yang sudah digunakan pemerintah di berbagai negara untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Di sisi lain, pemerintah dapat memanfaatkan dana sosial, seperti wakaf tunai atau tanah wakaf, untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu. Atau dengan berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga amil zakat di daerah untuk menysasar delapan kategori penerima zakat yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik, yang kemudian dicocokkan dengan data BDT.

Hal terakhir yang harus menjadi pertimbangan adalah membuat strategi perencanaan yang terukur dan sesuai dengan kondisi riil di daerah. Untuk mencapai hal ini, perlu koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan TKPK di daerah.

Pemerintah harus berani mengubah pola pikir bahwa tujuan utama perencanaan program bukanlah mengurangi angka kemiskinan, melainkan menghilangkan kemiskinan di setiap dimensi. Dengan melakukan hal ini, peran baik pemerintah akan terus hidup dalam ingatan dan kehidupan masyarakat.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, intepretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan non-komersial.

**Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Grand Kebon Sirih Lt.4, Jl.Kebon Sirih Raya No.35 Jakarta Pusat, 10110
T.021 - 3912812**

www.tnp2k.go.id

ISBN 978-602-275-172-4

